



LAPORAN PENELITIAN

Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar

KERJASAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Topik Kegiatan : Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rerata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar
2. Fokus Kegiatan : Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Moh. Yamin, M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 19800716 201012 1 003
 - d. NIDN : 0716078005
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/IIIb
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
 - h. Fakultas/Jurusan : FKIP/Pendidikan Bahasa Inggris
 - i. Pusat Penelitian : -
 - j. Alamat : Komplek Persada Raya IV Jalur 5 No. 17 Handil Bakti Barito Kuala
 - k. Telpon/Faks : 08123283995

4. Anggota Tim

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1)	Suyidno, M.Pd	Pendidikan Fisika	FKIP Unlam
2)	Syahlan Mattiro, M.A	Pendidikan Sosiologi	FKIP Unlam

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
6. Pembiayaan : APBD Kabupaten Banjar

Banjarmasin, Agustus 2015

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Arief Soendjoto, M.Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

Moh. Yamin, M.Pd
NIP. 19800716 201012 1 003

Menyetujui
Kepala Bappeda Kabupaten Banjar

Muhammad Rusdi, ST, MT
NIP. 19680723 199503 100 2

Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rerata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar

Oleh: Moh Yamin, Suyidno, Syahlan Mattiro

Abstrak

Meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengaruh tingkat kemiskinan penduduk, beban ketergantungan penduduk dan jarak sekolah terhadap lama sekolah, serta menentukan strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Populasi penelitian adalah pendidikan jenjang dasar dan menengah di Kabupaten Banjar dan sampel dipilih secara proporsional berdasarkan wilayah kota dan pinggiran. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, angket, dan wawancara. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar pada tahun 2010 sebesar 10,09% meningkat menjadi 10,93% (tahun 2011) menurun menjadi 7,94% (tahun 2012). Masyarakat ekonomi bawah (85,3%) dan masyarakat ekonomi menengah (52,4%) menyatakan kurang mampu membiayai pendidikan, karena biaya pendidikan dan transportasi mahal, keterbatasan ekonomi, banyak tanggungan; (2) Masyarakat memiliki tanggungan 1 orang (22,2%), 2 orang (84,6%), tanggungan 3 orang (46,6%), tanggungan 4 orang (28,6%), dan lebih dari 5 orang (18%). Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin merasa tidak mampu membiayai pendidikan, (3) Jarak tempuh sekolah <3 km (48,5% siswa), jarak 3-6 km (27,0% siswa), jarak 6-9 km (12,3% siswa), jarak 9-12 km (3,9% siswa), dan >12 km (8,5% siswa). Sebagian besar orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi, dan merasa tidak nyaman jika anaknya menuju sekolah yang jauh, (4) strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah: (a) pemetaan penerimaan bantuan dengan memperhatikan rumah tangga miskin, beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah, (b) Pembuatan database penerima beasiswa siswa miskin dengan pemukhtahiran data setiap semester, (c) membentuk Komisi/UPT Pengawasan penerapan berbagai beasiswa pada rumah tangga miskin (BOS, BSM, PKH, Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin, Bidik Misi) yang permanen beranggotakan Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, LSM bidang Pendidikan dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Banjar, (d) menyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu, (e) sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat, (f) Penyusunan Perda untuk mendukung Program KIP dan KKS, serta mengawal pendistribusian KIS, KIP, dan KKS agar tepat sasaran, (g) pembangunan sekolah (sekolah baru/sekolah satu atap/penambahan ruang kelas) terutama SLTP dan SLTA, (h) bantuan biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala jarak tempuh, (i) Meningkatkan peranan PERDA tentang Program CSR dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah, (j) pendistribusian tenaga pendidik dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: rata-rata lama sekolah, kemiskinan, beban tanggungan, dan jarak tempuh sekolah

KATA PENGANTAR

Tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Banjar sesuai RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar, dimana pada tahun 2012 sebesar 7,32 tahun diharapkan tahun 2016 menjadi 8,5 tahun dan tahun 2019 menjadi 8,8 tahun dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu. RLS mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk Kabupaten Banjar. Berarti semakin tinggi RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas penduduk dalam pola pikir maupun pola tindakannya. Oleh karena, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar ditinjau dari faktor tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah. Hasil penelitian dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.

Atas selesainya penelitian ini, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang menjadi pemandu kami dalam hidup di dunia ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Lemlit Unlam yang menjadi payung tim peneliti, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta Kepala Sekolah dan guru se-Kabupaten Banjar khususnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini menjadi rekomendasi bagi dinas terkait dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah ke depannya untuk mewujudkan **Misi Kabupaten Banjar, “Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia”** dan mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Banjarmasin, Agustus 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Pembangunan Manusia	6
B. Rata-rata Lama Sekolah	7
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah	9
1. Kemiskinan Penduduk	9
2. Beban Ketergantungan Penduduk	13
3. Jarak Tempuh ke Sekolah	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Variabel Penelitian	18
C. Populasi dan Sampel Penelitian	19
D. Tempat dan Waktu Penelitian	20
E. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Tingkat Kemiskinan Penduduk di Kabupaten Banjar	21
B. Tingkat Beban Ketergantungan Penduduk	30
C. Tingkat jarak tempuh terhadap lama sekolah	34

D. Strategi meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	43
1. Kekuatan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS	43
2. Kelemahan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS.....	45
3. Tantangan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS	46
4. Peluang Pelaksanaan Program Peningkatan RLS	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan	50
B. Strategi Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 RLS Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan	3
1.2 Persentase penduduk miskin dan jumlah pengangguran pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	4
2.1 Jenjang pendidikan dan faktor konversi RLS	8
2.2 Standar jarak dalam kota	22
3.1 Sebaran sampel	20
4.1 Kepadatan penduduk dan rumah tangga di kabupaten Banjar Tahun 2010-2013	21
4.2 Rumah tangga miskin, rumah taklayak huni, dan keluarga terasing di kabupaten Banjar Tahun 2010-2013	22
4.3 Persentase rumah tangga miskin, rumah taklayak huni, dan keluarga terasing di kabupaten Banjar Tahun 2010-2013	23
4.4 Jenis pekerjaan orang tua siswa	24
4.5 Rata-rata penghasilan orang tua siswa	25
4.6 Hubungan tingkat ekonomi orang tua siswa dengan kemampuan membiayai sekolah	25
4.7 Hubungan rumah tangga miskin dengan jumlah penduduk usia sekolah dan siswa sekolah	26
4.8 Kebijakan membantu pendidikan untuk masyarakat miskin	28
4.9 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan masyarakat miskin	29
4.10 Tanggungan keluarga	31
4.11 Tanggungan keluarga dan kemampuan membiayai pendidikan	31
4.12 Kebijakan membantu pendidikan untuk keluarga dengan tanggungan	32
4.13 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan rumah tangga dengan tanggungan	33
4.14 Jumlah siswa dan jarak tempuh ke sekolah	35
4.15 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SD yang tidak bersekolah	36

4.16 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SLTP yang tidak bersekolah	37
4.17 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SLTA yang tidak bersekolah	37
4.18 Kebijakan pendidikan membantu mengatasi jarak tempuh	38
4.19 Kebijakan dan saran kebijakan mengatasi jarak tempuh	39
4.20 Analisis SWOT	48
5.1 Strategi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2004-2013	11
2.2 Persentase penduduk miskin per provinsi tahun 2013	12
2.3 Proyeksi tingkat kemiskinan dan TPT 2015-2019	12
2.4 Proyeksi rasio ketergantungan Indonesia 2010-2035	15
4.1 Grafik rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar	22
4.2 Hubungan Rumah tangga miskin, dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing di Kabupaten Banjar	24
4.3 Grafik hubungan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing terhadap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah	27
4.4 Kebijakan membantu pendidikan masyarakat miskin	28
4.5 Berbagai kebijakan pendidikan untuk masyarakat miskin	28
4.6 Hubungan tanggungan keluarga dan kemampuan membiayai pendidikan	31
4.7 Kebijakan pendidikan untuk keluarga dengan tanggungan	32
4.8 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan masyarakat dengan tanggungan	33
4.9 Grafik jumlah siswa terhadap jarak tempuh ke sekolah	35
4.10 Perasaan terbebani orang tua dengan jarak tempuh sekolah	36
4.11 Kebijakan pendidikan untuk mengatasi jarak tempuh	35
4.12 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada Sekolah Dasar	40
4.13 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTP	40
4.14 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya (Permeneg PP & PA Nomor 5 Tahun 2011). Pendidikan memberikan perlindungan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan menjamin tersedianya dana pendidikan untuk setiap warganegara yang berusia 7-15 tahun tanpa diskriminasi. Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 16 tahun sampai 18 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar dan daerah terpencil untuk mengikuti pendidikan menengah. Serta RPJM 2015-2019 menjelaskan tantangan pembangunan pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depan adalah peningkatan akses pendidikan menengah melalui Wajib 12 Tahun dengan memprioritaskan dukungan kepada anak dari keluarga tidak mampu, meningkatkan kualitas pendidikan menengah melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitasnya. Layanan pendidikan tinggi yang berkualitas juga harus dapat diakses oleh seluruh penduduk usia sekolah agar mereka mampu menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang (Bappenas, 2014). Pembangunan pendidikan harus menjamin hak layanan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing dalam upaya menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Program pembangunan manusia telah menjadi perhatian utama para penyelenggara pemerintahan (Budiriyanto, 2011). Program pembangunan manusia di Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana baseline angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 (8,1 tahun), 2016 (8,5 tahun) dan 2019 (8,8 tahun) (Bappenas, 2015). Pembangunan sumber daya manusia di propinsi Kalimantan Selatan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan dengan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, mendidik tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja, meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan pada masyarakat miskin (RPJMD Propinsi kalsel 2011-2015). Rencana pembangunan tersebut sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banjar 2011-2015 untuk mewujudkan **misi memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia**, di antaranya dengan meningkatkan manajemen mutu lembaga pendidikan secara merata, meningkatkan kuantitas serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi, memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin. Berarti pemerintah dan pemerintah Kabupaten Banjar harus memberikan perhatian pada pendidikan anak sebagai roda penggerak pembangunan Kabupaten Banjar di masa mendatang.

Tantangan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dalam RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan jenjang menengah dan pendidikan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat (Bappenas, 2014). UNDP (1995) menetapkan standar pembangunan manusia pada bidang

pendidikan salah satu indikatornya adalah rata-rata lama sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2012). Populasi penduduk yang digunakan berumur 15 tahun ke atas karena kenyataannya pada usia tersebut sudah ada penduduk yang berhenti sekolah, sedangkan penduduk berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah. Bappenas (2015) menjelaskan bahwa variasi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas masih cukup lebar dan cukup banyak daerah yang rata-rata lama sekolahnya kurang dari 6 tahun. Adapun RLS Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 RLS Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Kota Banjarbaru	9,56	10,03	10,66
2	Kota Banjarmasin	6,97	9,56	9,88
3	Kabupaten Tabalong	7,27	8,14	8,16
4	Kabupaten Tanah Bumbu	8,14	7,33	7,56
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	7,35	7,44	7,50
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	7,44	7,48	7,49
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	7,12	7,35	7,37
8	Kabupaten Banjar	7,03	7,25	7,32
9	Kabupaten Tanah Laut	7,65	7,00	7,27
10	Kabupaten Tapin	7,07	7,12	7,26
11	Kabupaten Barito Kuala	7,25	7,07	7,25
12	Kabupaten Kotabaru	6,88	7,03	7,09
13	Kabupaten Balangan	7,12	7,00	7,01
14	Prov. Kalimantan Selatan	7,65	7,68	7,89

Sumber: BPS Propinsi Kalsel 2013

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa RLS kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan yang sudah memenuhi harapan pemerintah adalah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tabalong, sementara 11 Kabupaten Lainnya termasuk Kabupaten Banjar pada peringkat 8 dan masih belum memenuhi target rata-rata lama sekolah.

RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal (Ernawati, 2013). Tingkat kemiskinan menunjukkan perbandingan jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Banjar terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. Beban ketergantungan adalah perbandingan penduduk yang berusia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) terhadap penduduk yang berusia produktif (antara 15 – 64 tahun) di Kabupaten Banjar dan dinyatakan dalam satuan orang. Sedangkan tempat tinggal berarti seberapa jauh jarak tempuh dari rumah ke sekolah dan begitu sebaliknya. RLS juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia (Nugroho, 2012; Fitri, 2013). Persentase penduduk miskin dan jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Persentase penduduk miskin dan jumlah pengangguran pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No	Kab/Kota	Penduduk Miskin (%)	Peringkat Kemiskinan	Jumlah Pengangguran	Peringkat Pengangguran
1	Banjar	3.69	1	10.379	11
2	Banjarmasin	4.8	2	30.331	13
3	Tapin	4.93	3	5.729	4
4	Tanah Laut	5.11	4	6.828	7
5	Banjarbaru	5.20	5	6.883	8
6	Kotabaru	5.55	6	7.919	9
7	Barito Kuala	5.61	7	6.235	6
8	HST	5.73	8	8.350	10
9	Tanah Bumbu	5.89	9	10.652	12
10	Tabalong	6.83	10	3.653	2
11	Balangan	7.22	11	1.473	1
12	HSU	7.29	12	5.706	3
13	HSS	7.32	13	5.813	5

Sumber: RPJMD Provinsi Kalsel, 2011 - 2015

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa meskipun RLS Kabupaten Banjar berada pada peringkat kedelapan diantara Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan, tetapi persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar paling sedikit dan jumlah pengangguran peringkat 11. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama penelitian kebijakan antara Bappeda Kabupaten Banjar dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat melalui kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar dan menentukan strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan penduduk terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana pengaruh tingkat beban ketergantungan penduduk terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar?
3. Bagaimana pengaruh tingkat jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar?
4. Bagaimana strategi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pengaruh tingkat kemiskinan penduduk, tingkat beban ketergantungan penduduk dan tingkat jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar, serta menentukan strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian adalah diperoleh informasi tentang pengaruh tingkat kemiskinan penduduk terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar, pengaruh tingkat beban ketergantungan penduduk terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar, dan pengaruh tingkat jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah terhadap lama sekolah di Kabupaten Banjar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Manusia

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kemanusiaan dan manusia yang berkualitas merupakan target utama yang harus dicapai karena berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Manusia berkualitas akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu inovatif dan produktif dalam menjalankan hidupnya, terus bekerja dengan ide dan pemikirannya yang produktif untuk pembangunan, serta tidak pernah berhenti berproses untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi, mereka selalu merasa tertantang untuk menjawab perubahan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan sesungguhnya adalah hasil dari sebuah kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga pembangunan nasional harus berorientasi pada pembangunan manusia berkualitas untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging peoples's choices*) (UNDP, 1990). UNDP (1995) menjelaskan aspek-aspek pembangunan manusia meliputi: (1) mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; (2) dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata; (3) memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan dan kapasitas manusia tersebut secara optimal; (4) didukung empat pilar pokok yaitu: (a) **produktifitas**, penduduk harus mampu meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses

penciptaan pendapatan dan nafkah, (b) **pemerataan**, penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Berbagai hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup, (c) **kesinambungan**, akses sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Semua sumber daya manusia, fisik dan lingkungan harus selalu diperbaharui, (d) **pemberdayaan**, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, dan pengambilan manfaat dari proses pembangunan; dan (5) menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

UNDP (1995) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.

B. Rata-rata Lama Sekolah

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi (Bappenas, 2014). Salah satu konsep pembangunan manusia adalah pengembangan pengetahuan penduduk melalui peningkatan angka rata-rata lama sekolah (UNDP, 1995). Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan

agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk diperhitungkan rata-rata lama sekolahnya.

Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. RLS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan **Faktor Konversi** pada variabel “Pendidikan yang Ditamatkan” sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jenjang pendidikan dan faktor konversi RLS

No	Jenjang Pendidikan	Faktor Konversi
1	Tidak, belum pernah sekolah	0
2	Belum tamat SD	3
3	Tamat SD sederajat	6
4	Tamat SLTP	9
5	Tamat SLTA	12
6	Tamat D I	13
7	Tamat D II	14
8	Tamat D III/Sarjana Muda/Akademi	15
9	Tamat D IV/Sarjana	16
10	Tamat S2	18
11	Tamat S3	21

Bappenas, UNDP 2001

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya. Cerminan angka RLS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

$$RLS = \frac{\sum f_i \times s_i}{\sum f_i}$$

Dimana: RLS = Rata – rata lama sekolah

f_i = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i , $i = 1,2,\dots,11$

s_i = Skor masing-masing jenjang pendidikan

Penghitungan RLS secara sederhana misalnya: Kabupaten Banjar terdapat 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Banjar adalah $\{5 (6) + 5 (9) +5 (12) +5 (0) \} : 20 = 6,75$ tahun.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Berarti semakin tinggi RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. RLS seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari pendidikan (Todaro, 2004). Ernawati (2013) juga menyimpulkan bahwa RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal.

1. Kemiskinan Penduduk

Kemiskinan menggambarkan keadaan dimana individu atau rumah tangga berada dalam kondisi yang sangat kekurangan dalam kesejahteraannya (Barientos, 2010). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjelaskan kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang/sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kementrian Bidang Kesejahteraan tahun 2004 menjelaskan bahwa kondisi miskin juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Dengan demikian, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). BPS (1994) Indonesia mendasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. UNDP (1997)

menggunakan tolok ukur kemiskinan meliputi kehidupan, pendidikan dasar, dan ketetapan ekonomi.

Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. **Pertama**, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. **Kedua**, gambaran kebutuhan sosial, termasuk pengasingan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pengasingan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. **Ketiga**, gambaran kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia (Bappenas, 2004).

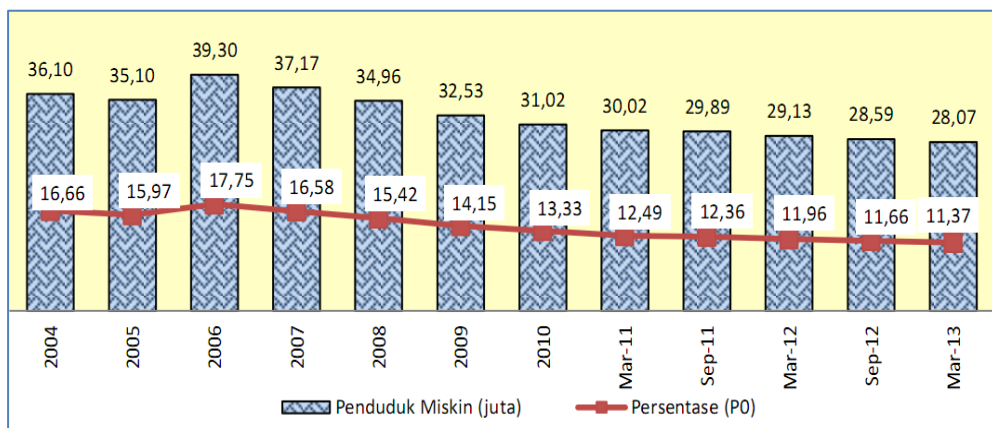
Indikator utama kemiskinan adalah: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan terbatas; (8) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (9) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (10) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (11) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (12) lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah; (13) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (14) terbatasnya akses terhadap air bersih; (15) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (16) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (17) lemahnya jaminan rasa aman; (18) lemahnya partisipasi; (19) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (20) tata kelola pemerintahan buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Sholeh, 2011).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor individual maupun keluarga. Penyebab individual melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan,

atau kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga adalah menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga, diantaranya (1) penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; (2) penyebab agensi, melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Mengingat ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, (3) Penyebab struktural, memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri sering dipengaruhi kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan, yang paling penting adalah kurang meratanya distribusi pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kemiskinan dapat diukur menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) kemiskinan absolut, dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok/dasar. Kemiskinan ini digolongkan menjadi kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, (2) kemiskinan relatif, dikaitkan dengan ketimpangan antara tingkat hidup orang kaya dan miskin, serta semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distribusi pendapatan.

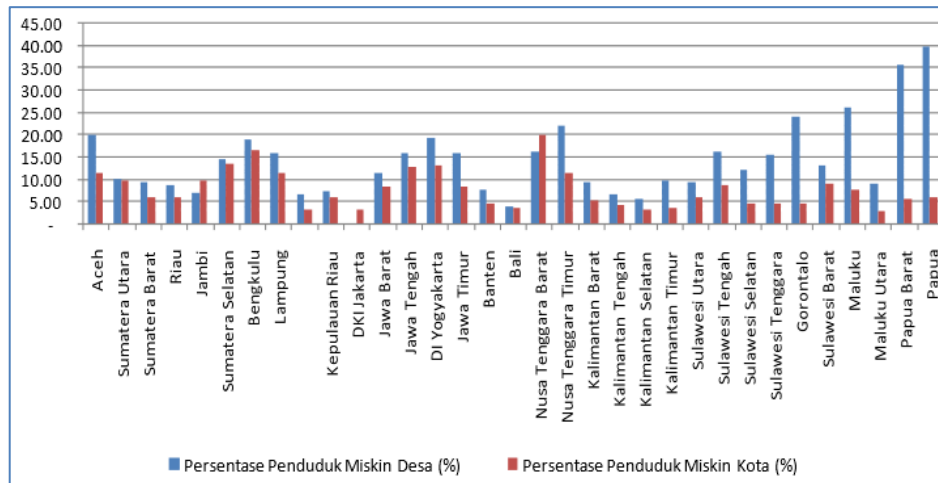
Perkembangan tingkat kemiskinan dari tahun 2004 sampai dengan Maret 2013 disajikan pada Gambar 2.1.



Sumber: BPS, 2013

Gambar 2.1 Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2004-2013

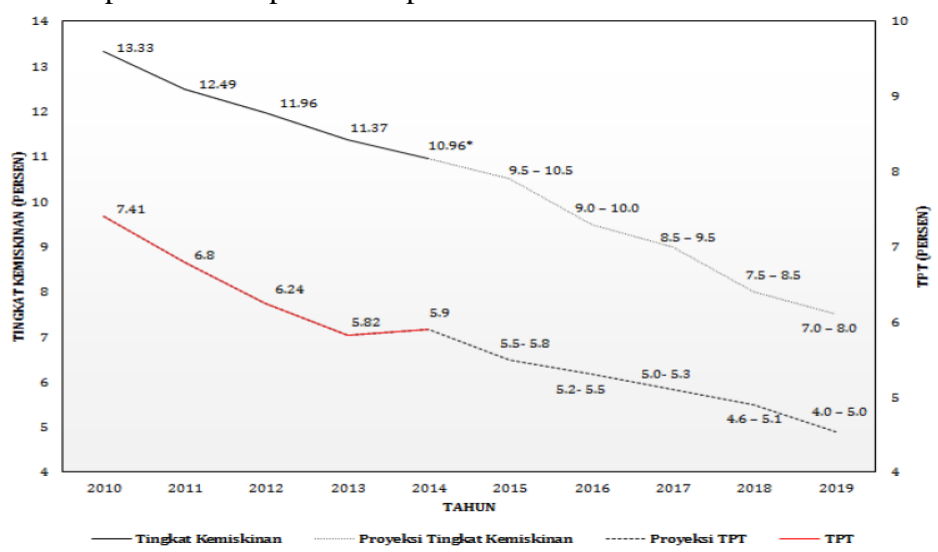
Persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke 2005, tetapi tahun 2006 mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95%. Tahun 2007 sampai Maret 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin dari desa dan kota perpropinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



(Sulistyaningrum, 2014)

Gambar 2.2 Persentase penduduk miskin per provinsi tahun 2013

Berbagai kebijakan pembangunan dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 7% - 8% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4% – 5% pada akhir tahun 2019. Proyeksi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Proyeksi tingkat kemiskinan dan TPT 2015-2019

Langkah-langkah konkret pemerintah untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya: (1) meningkatkan produktivitas melalui akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian sebagai pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (2) meningkatkan standar hidup pekerja miskin melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (3) transformasi struktur tenaga kerja dengan menyiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; (4) pemberian insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan padat pekerja dan pelaku usaha kecil menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai apabila pertumbuhan ekonomi yang tercipta memberi kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

2. Beban Ketergantungan Penduduk

Penduduk yang berpotensi bekerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 55 tahun. Usia 55 tahun dipakai sebagai batasan akhir usia penduduk yang berpotensi bekerja karena disamakan dengan usia pensiun pegawai negeri sipil. Sedangkan batasan akhir usia penduduk di negara maju yang berpotensi bekerja adalah 65 tahun, disamakan dengan batasan penduduk usia lanjut di negara-negara tersebut. Perserikatan Bangsa-bangsa memberi batasan penduduk yang berpotensi bekerja adalah mereka yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun disebut dengan penduduk usia produktif. Mereka yang berusia kurang dari 15 tahun atau lebih dari 55 tahun (menurut BPS) atau lebih dari 64 tahun (menurut PBB) disebut penduduk yang tidak produktif atau tidak berpotensi untuk bekerja.

Penduduk produktif diharapkan dapat menghasilkan atau mempunyai penghasilan sehingga dapat memenuhi konsumsi hidupnya. Misalnya seseorang yang berusia 38 tahun mempunyai keluarga dengan 2 anak berusia 5 tahun dan 10 tahun serta orang tuanya masih hidup berusia 67 tahun. Orang ini mempunyai penghasilan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi dirinya sendiri, anak-

anaknyanya, serta orang tuanya. Ini berarti bahwa yang bersangkutan akan menanggung hidup anak-anaknya dan juga orang tuanya. Penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia tidak produktif. Besar tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif diukur dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang disebut juga sebagai angka beban tanggungan.

Dependency ratio adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang tidak produktif, yaitu yang berusia kurang dari 15 tahun dan yang berusia sama atau lebih dari 65 tahun terhadap orang yang berusia produktif, yaitu yang berusia 15 hingga 64 tahun.

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}}$$

Keterangan:

DR = *dependency ratio* atau rasio ketergantungan

P₀₋₁₄ = jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun

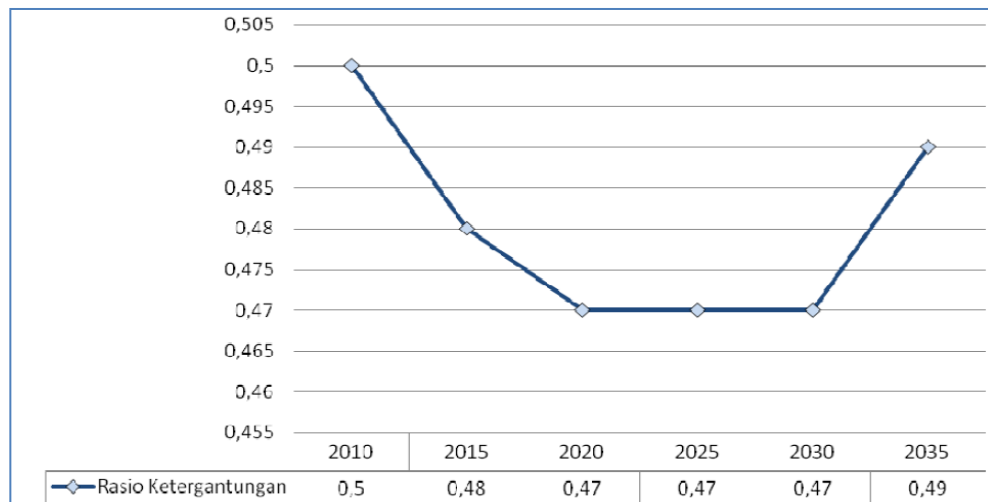
P₆₅₊ = jumlah penduduk usia 65 tahun dan lebih

P₁₅₋₆₄ = jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun

Nilai rasio ketergantungan adalah indikator kasar keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin rendah angka beban ketergantungan berarti penduduk usia produktif semakin tinggi. Hal ini dijadikan indikator potensi ekonomi yang mungkin tercipta yang juga disebut sebagai jendela peluang atau dari sisi kependudukan disebut dengan bonus demografi, yaitu potensi ekonomi dari suatu negara ketika angka beban ketergantungan berada pada titik rendah.

Sukanto, dkk (2010) melakukan proyeksi angka beban ketergantungan di Indonesia berdasarkan hasil proyeksi penduduk menghasilkan tiga pola. Pertama, turun secara nyata mulai 2010 sampai sekitar 2020, dari angka 50 menjadi 47. Pada periode ini Indonesia secara ekonomi berpotensi mendekati gerbang kejayaan. Kedua, stabil pada angka terendah mulai tahun 2020 sampai 2030, yaitu pada angka beban ketergantungan 47. Ini adalah angka beban ketergantungan terendah yang akan dicapai di Indonesia dan dapat bertahan sekitar sepuluh tahun. Pada periode ini Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju dan jaya yang sering diidamkan sebagai negara yang sejahtera. Perlu disadari ini adalah peluang

yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan oleh banyak pihak, yang akan terwujud apabila kondisinya kondusif. Persiapan yang salah akan membuang peluang sehingga yang sedianya peluang kemajuan justru menjadi bencana (*demographic disaster*). Ketiga, mulai tahun 2030 angka beban ketergantungan menjadi naik seiring dengan meningkatnya penduduk lansia di Indonesia. Proyeksi rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2010-2035 akan disajikan pada Gambar 4.2.



Sumber: BPS dalam Sukamdi, dkk (2010)

Gambar 2.4 Proyeksi rasio ketergantungan Indonesia 2010-2035

Persoalan yang muncul di Indonesia setelah 2030 adalah cara pengelolaan lansia. Hasil proyeksi penduduk yang juga dapat dicermati terkait dengan perencanaan sektoral adalah jumlah penduduk usia anak, usia remaja, usia produktif, dan usia lansia. Program pembangunan yang relevan dengan hasil tersebut diantaranya adalah peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk.

3. Jarak Tempuh ke Sekolah

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006). Teori lokasi adalah suatu penjelasan teoretis yang dikaitkan dengan tata ruang dari kegiatan ekonomi. Hal ini selalu dikaitkan pula dengan alokasi geografis dari sumber daya terbatas yang akan berpengaruh terhadap lokasi berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial (Sirojuzilam, 2006).

Aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota, dikenal standar lokasi (*standard for location requirement*) atau standar jarak (Jayadinata, 1999: 160) seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Standar jarak dalam kota

No	Prasarana	Jarak dari Tempat Kerja (Jalan Kaki)
1	Pusat Tempat Kerja	20 s/d 30 menit
2	Pusat Kota (Pasar dan sebagainya)	30 s/d 45 menit
3	Pasar Lokal	3/4 km atau 10 menit
4	Sekolah Dasar	3/4 km atau 10 menit
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1, 5 km atau 20 menit
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	20 s/d 30 menit
7	Tempat Bermain Anak atau Taman	3/4 km atau 20 menit
8	Tempat Olah Raga (Rekreasi)	1, 5 menit atau 20 menit
9	Taman Umum (Cagar, Kebun Binatang, dsb)	30 s/d 60 menit

Sumber: Chapin dalam Jayadinata (1999)

Terkait sekolah sebagai ruang pendidikan, maka ia dipastikan memiliki daya tarik sendiri bagi daerah-daerah disekelilingnya. Masyarakat melakukan pergerakan menuju suatu pusat pelayanan memiliki dua alasan yaitu faktor intern yang berasal dari masyarakat itu sendiri (faktor pendorong) dan faktor daya tarik yang dimiliki pusat pelayanan (faktor penarik). Faktor pendorong masyarakat dalam hal ini yaitu siswa melakukan pergerakan menuju pusat pelayanan diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi, lokasi dan kemampuan akademik individu. Sedangkan faktor penarik yang berasal dari sekolah yaitu lokasi sekolah yang dekat atau strategis, biaya transportasi yang murah, kemudahan dalam pelayanan, prestasi sekolah, keberagaman jurusan dan fasilitas sekolah. Segala kelebihan yang dimiliki sekolah sebagai pusat pelayanan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk memilih sekolah tersebut sebagai pilihannya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang dilakukan dalam dua tahap.

1. Tahap pertama akan dilakukan pengumpulan data sekunder berupa jumlah penduduk, data tentang sebaran penduduk di 20 kecamatan untuk usia produktif pada usia 15 tahun ke atas baik yang bersekolah maupun putus sekolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar.
 - a. Data tentang jumlah penduduk digunakan untuk mengetahui rata-rata lama sekolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{\sum fi \times si}{\sum fi}$$

Keterangan:

RLS = Rata – rata lama sekolah

fi = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan i, i = 1,2,...,11

si = Skor masing-masing jenjang pendidikan

- b. Data tentang jumlah penduduk digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin.
 - c. Data tentang jumlah penduduk digunakan untuk mengetahui tingkat beban ketergantungan penduduk dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}}$$

Keterangan:

DR = *dependency ratio* atau rasio ketergantungan

P₀₋₁₄ = jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun

P₆₅₊ = jumlah penduduk usia 65 tahun dan lebih

P₁₅₋₆₄ = jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun

2. Tahap pengumpulan data primer melalui penyebaran angket pada sampel penelitian untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar yang mengacu pada beberapa variabel penelitian meliputi faktor kemiskinan, beban kertegantungan hidup penduduk, dan jarak tempuh sekolah. Serta wawancara mendalam kepada Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh masyarakat sekitar untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi lama sekolah di Kabupaten Banjar yang selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan strategi kebijakan untuk mendukung peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian diarahkan untuk menjawab tujuan penelitian yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk indikator penelitian, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Jabaran Variabel Penelitian

	Aspek/Variabel	Indikator	Sumber Data
	Profil penduduk usia produktif	1. Profil penduduk usia produktif untuk mengetahui rata-rata lama sekolah 2. Profil penduduk usia produktif untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di kota dan pinggiran 3. Profil penduduk usia produktif untuk mengetahui tingkat beban ketergantungan penduduk	Badan Pusat Statistik/ Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
	Faktor Penyebab	1. Kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak b. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif c. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis serta akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas d. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup e. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi f. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan 	Kuisisioner

	Aspek/Variabel	Indikator	Sumber Data
		g. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan h. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta perbedaan upah	
		2. Beban kertegantungan penduduk a. Kondisi umur orang tua b. Profesi c. Pendapatan dan pengeluaran d. Jumlah keluarga yang ditanggung-dibiayai	
		3. Jarak tempuh ke sekolah a. Lokasi sekolah yang dekat atau strategis 1) Sekolah Dasar (3/4 km atau 10 menit) 2) Sekolah Menengah Pertama (1, 5 km atau 20 menit) 3) Sekolah Menengah Atas (20 s/d 30 menit) b. Biaya transportasi yang murah c. Kemudahan dalam pelayanan	
	Arahan Strategi	Opsi kebijakan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.	Wawancara Stakeholders

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah masyarakat yang berusia produktif di atas 15 tahun baik yang bersekolah maupun putus sekolah, orang tua siswa, pejabat dinas pendidikan, dan tokoh masyarakat. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Wilayah yang akan menjadi sampel (anak didik, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat) dibagi menjadi wilayah perkotaan dan pinggiran. Wilayah perkotaan meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Tabuk, sedangkan wilayah pinggiran meliputi Kecamatan Aluh Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Pendekatan yang digunakan untuk menyebut wilayah perkotaan adalah karena dekat dengan ibu kota kabupaten dan wilayah pinggiran jauh dari ibu kota

kabupaten secara geografis berdasarkan peta wilayah serta tingkat perkembangan kependudukan. Berikut di bawah ini adalah sebaran sampel setiap kecamatan:

Tabel 3.1 Sebaran sampel

No	Kecamatan	Kategori Wilayah		Tokoh Masyarakat	Warga Peserta Didik/Non Peserta Didik	Orang Tua Peserta Didik
		Kota	Pinggiran			
1	Martapura	x		1	8	8
2	Gambut	x		1	8	8
3	Kertak Hanyar	x		1	8	8
4	Sungai Tabuk	x		1	8	8
5	Aluh-Aluh		x	1	8	8
6	Aranio		x	1	8	8
7	Karang Intan		x	1	8	8
8	Sungai Pinang		x	1	8	8
9	Pengaron		x	1	8	8
10	Simpang Empat		x	1	8	8
11	Sambung Makmur		x	1	8	8
12	Cintapuri Darussalam		x	1	8	8
	Total			12	96	96

Catatan: Peserta didik sebanyak 8 dibagi 4 kelompok, yakni, 2 untuk yang tidak bersekolah, 2 untuk tamatan SD dan MI, 2 untuk tamatan SMP dan MTs, dan 2 untuk tamatan SMA dan MA. Ini juga berlaku bagi orang tua peserta didik.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Banjar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Propinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan, analisis data, hingga pelaporan dilakukan pada tahun 2015.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis tabel silang (*cross tabulation*) untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar yang disusun dalam bentuk skala pertanyaan/skala likert (nilai skala 1-5) dari masing-masing variabel penelitian yang diajukan dalam item kuesioner. Arah strategi menggunakan teknik analisis SWOT untuk menentukan strategi dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kemiskinan Penduduk di Kabupaten Banjar

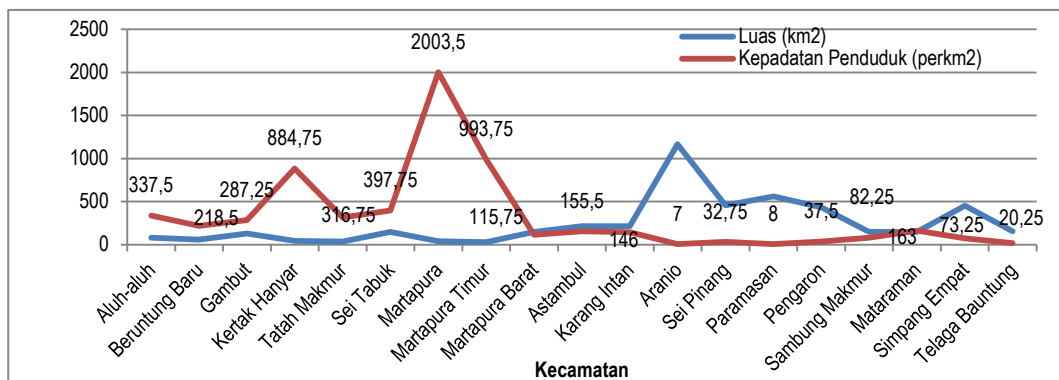
Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk (UU No 59 Tahun 2009). Perkembangan penduduk di Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh luas wilayah dan penduduk atau rumah tangga yang terlibat di dalamnya. Kepadatan penduduk dari tahun 2010 sampai 2013 sangat dipengaruhi banyaknya rumah tangga yang berkembang secara fluktuatif. Kepadatan penduduk dan banyaknya rumah tangga pada setiap kecamatan dari tahun 2011 sampai 2013 selalu mengalami kenaikan dan secara ringkas disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kepadatan penduduk dan rumah tangga di kabupaten Banjar Tahun 2010-2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (perkm ²)				Rumah Tangga			
			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Aluh-aluh	82,48	331	333	340	346	7220	7266	7280	7471
2	Beruntung Baru	61,42	215	215	220	224	3514	3517	3526	3630
3	Gambut	129,3	278	285	292	294	9486	9596	9623	9911
4	Kertak Hanyar	45,83	849	881	905	904	10095	10249	10277	10612
5	Tatah Makmur	35,47	309	312	318	328	2808	2833	2840	2937
6	Sei Tabuk	147,3	386	395	406	404	15099	15269	15311	15604
7	Martapura	42,03	2414	2498	545	2557	26057	26413	26482	27248
8	Martapura Timur	29,99	974	988	998	1015	6057	7821	7836	7967
9	Martapura Barat	149,38	114	114	116	119	4492	4530	4541	4626
10	Astambul	216,5	152	153	157	160	8654	8693	8709	8963
11	Karang Intan	215,35	142	144	147	151	8532	8622	8643	8932
12	Aranio	1166,35	7	7	7	7	2185	2213	2219	2285
13	Sei Pinang	458,65	32	32	33	34	4069	4111	4121	4329
14	Paramasan	560,85	8	8	8	8	1119	1136	1139	1241
15	Pengaron	433,25	36	37	38	39	4204	4244	4255	4421
16	Sambung Makmur	148,4	78	80	82	89	2568	2605	2612	2891
17	Mataraman	148,4	159	161	165	167	6715	6773	6790	6928
18	Simpang Empat	453,3	71	72	74	76	8851	8925	8947	9373
19	Telaga Bauntung	158	20	20	20	21	881	888	890	921
Jumlah							132606	135704	136041	140290

Sumber: Analisis data BPS tahun 2011-2014

Grafik rata-rata kepadatan penduduk pada setiap kecamatan pada tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Grafik rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar paling besar di Martapura (2003,5 penduduk/km²), Martapura Timur (993,75 penduduk/km²), Kertak Hanyar (884,75 penduduk/km²), Sei Tabuk (397,75 penduduk/km²). Sedangkan kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Aranio (7 penduduk/km²) dan Paramasan (8 penduduk/km²).

Perkembangan rumah tangga di Kabupaten Banjar umumnya disertai permasalahan sosial terutama rumah tangga miskin yang disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rumah tangga miskin, rumah tangga dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing di Kab. Banjar Tahun 2010-2013

No	Kecamatan	Rumah Tangga				Rumah Tangga Miskin				Rumah Tangga dengan Rumah tak Layak Huni				Keluarga Terasing			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Aluh-aluh	7220	7266	7280	7471	896	896	275	275	529	529	80	80	0	0	0	0
2	Beruntung Baru	3514	3517	3526	3630	585	585	252	252	177	177	64	64	0	0	0	0
3	Gambut	9486	9596	9623	9911	834	258	533	533	334	264	106	106	0	0	0	0
4	Kertak Hanyar	10095	10249	10277	10612	335	335	414	414	111	111	135	135	0	0	0	0
5	Tatak Makmur	2808	2833	2840	2937	178	178	470	470	115	115	125	125	0	0	0	0
6	Sei Tabuk	15099	15269	15311	15604	1803	1803	2219	2219	669	669	285	285	0	0	0	0
7	Martapura	26057	26413	26482	27248	6901	6901	1199	1199	244	244	208	208	0	0	0	0
8	Martapura Timur	26057	7821	7836	7967	395	395	470	470	98	98	115	115	0	0	0	0
9	Martapura Barat	4492	4530	4541	4626	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0
10	Astambul	8654	8693	8709	8963	310	310	364	364	104	104	88	88	0	0	0	0
11	Karang Intan	8532	8622	8643	8932	2007	2007	3377	3377	91	91	357	357	0	0	0	0
12	Aranio	2185	2213	2219	2285	97	97	97	97	29	29	29	29	0	0	0	0
13	Sei Pinang	4069	4111	4121	4329	297	297	297	297	153	153	153	153	137	137	137	137
14	Paramasan	1119	1136	1139	1241	0	66	140	140	109	109	108	108	532	532	532	532
15	Pengaron	4204	4244	4255	4421	92	92	449	449	80	80	81	81	0	0	14	14
16	Sambung Makmur	2568	2605	2612	2891	21	21	0	13	22	22	13	30	0	0	0	0
17	Mataraman	6715	6773	6790	6928	576	576	173	173	105	105	3	3	0	0	0	0
18	Simpang Empat	8851	8925	8947	9373	51	3	51	51	3	3	3	3	0	0	0	0
19	Telaga Bauntung	881	888	890	921	19	19	24	24	10	10	0	0	0	0	0	0
Jumlah		152606	135704	136041	140290	15397	14839	10806	10819	2983	2913	1957	1974	669	669	683	683

Sumber: Analisis data BPS tahun 2011-2014

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

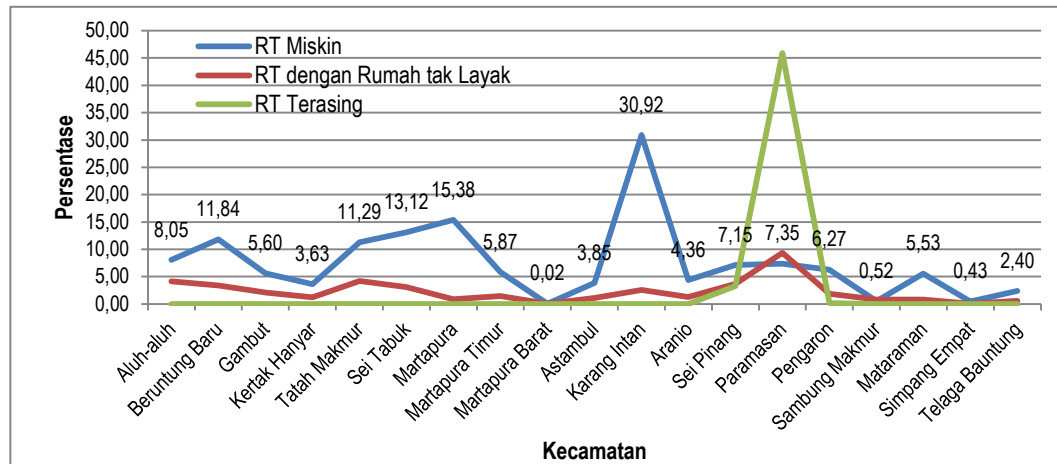
Rumah tangga miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan minimum antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Mereka juga kurang menguasai asset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga pendapatan keluarga dalam masyarakat terbatas. Permasalahan sosial di masyarakat selain dikarenakan adanya rumah tangga miskin, juga adanya rumah tangga dengan rumah tak layak huni dan keluarga terasing di Kabupaten Banjar yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Persentase rumah tangga miskin, rumah taklayak huni, dan keluarga terasing di kabupaten Banjar Tahun 2010-2013

No	Kecamatan	Miskin (%)				Rumah tak Layak Huni (%)				Terasing (%)			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	Aluh-aluh	12,41	12,33	3,78	3,68	7,33	7,28	1,10	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beruntung Baru	16,65	16,63	7,15	6,94	5,04	5,03	1,82	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gambut	8,79	2,69	5,54	5,38	3,52	2,75	1,10	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kertak Hanyar	3,32	3,27	4,03	3,90	1,10	1,08	1,31	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tatah Makmur	6,34	6,28	16,55	16,00	4,10	4,06	4,40	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sei Tabuk	11,94	11,81	14,49	14,22	4,43	4,38	1,86	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Martapura	26,48	26,13	4,53	4,40	0,94	0,92	0,79	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Martapura Timur	1,52	5,05	6,00	5,90	0,38	1,25	1,47	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Martapura Barat	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Astambul	3,58	3,57	4,18	4,06	1,20	1,20	1,01	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Karang Intan	23,52	23,28	39,07	37,81	1,07	1,06	4,13	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aranio	4,44	4,38	4,37	4,25	1,33	1,31	1,31	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Sei Pinang	7,30	7,22	7,21	6,86	3,76	3,72	3,71	3,53	3,37	3,33	3,32	3,16
14	Paramasan	0,00	5,81	12,29	11,28	9,74	9,60	9,48	8,70	47,54	46,83	46,71	42,87
15	Pengaron	2,19	2,17	10,55	10,16	1,90	1,89	1,90	1,83	0,00	0,00	0,33	0,32
16	Sambung Makmur	0,82	0,81	0,00	0,45	0,86	0,84	0,50	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mataraman	8,58	8,50	2,55	2,50	1,56	1,55	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Simpang Empat	0,58	0,03	0,57	0,54	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Telaga Bauntung	2,16	2,14	2,70	2,61	1,14	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Kabupaten		10,09	10,93	7,94	7,71	1,95	2,15	1,44	1,41	0,44	0,49	0,50	0,49

Sumber: Analisis data BPS tahun 2011-2014

Perkembangan rumah tangga miskin dari tahun 2010 sampai 2013 berlangsung fluktuatif, secara umum tahun 2011 mengalami kenaikan 0,84%, kemudian tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan masing-masing 2,99% dan 0,23%. Persentase rumah tangga miskin di setiap kecamatan disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Hubungan Rumah tangga miskin, dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing di Kabupaten Banjarnegara

Rumah tangga miskin pada umumnya terjadi pada anggota keluarga baik yang salah satunya tidak bekerja atau meninggal dunia, bekerja sebagai buruh tani/bangunan, buruh pabrik, bekerja serabutan dengan pendapatan tidak tetap, guru ngaji/honor, buruh pabrik, dan lain-lain. Jenis pekerjaan orang tua siswa dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jenis pekerjaan orang tua siswa

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah		Persentase	
		Bapak	Ibu	Bapak	Ibu
1	Tidak bekerja	2	48	2,1	50,5
2	Buruh tani/bangunan	29	15	30,5	15,8
3	Buruh pabrik	0	2	0,0	2,1
4	serabutan	3	1	3,2	1,1
5	Guru ngaji/honor	1	2	1,1	2,1
6	Buruh pabrik	0	2	0,0	2,1
7	Nelayan	4	0	4,2	0,0
8	Petani/peternak pemilik	15	8	15,8	8,4
9	Karyawan swasta	25	5	26,3	5,3
10	Pedagang kecil	6	13	6,3	13,7
11	Pendulang emas	2	0	2,1	0,0
12	Pedagang besar	0	0	0,0	0,0
13	Pengusaha kecil/menengah	2	0	2,1	0,0
14	Pengusaha besar	0	0	0,0	0,0
15	Karyawan BUMN	3	0	3,2	0,0
	PNS/TNI/Polri	3	1	3,2	1,1
Total		95	95	100,0	100,0

Sumber: analisis data angket orang tua

Rumah tangga miskin pada umumnya memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000/bulan atau masyarakat ekonomi bawah (sekitar 29%) dan sebagian terjadi pada masyarakat ekonomi menengah dengan kondisi tertentu yang menyebabkan kemiskinan seperti banyaknya tanggungan keluarga, anggota keluarga ada yang sakit, dll. Adapun rata-rata penghasilan orang tua siswa di Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Rata-rata penghasilan orang tua siswa

No	Rata-rata penghasilan	Pendapat Orang tua siswa				Pendapat Siswa	
		Bapak	%	Ibu	%	Orang tua	%
1	< 500.000	27	28,4	28	29,5	29	30,9
2	500.000 - 1.000.000	23	24,2	12	12,6	29	30,9
3	1.000.000 - 1.500.000	30	31,6	12	12,6	13	13,8
4	1.500.000 - 2.000.000	6	6,3	0	0,0	10	10,6
5	2.500.000 - 3.000.000	9	9,5	2	2,1	10	10,6
6	> 3.000.000	0	0,0	41	43,2	3	3,2
		95	100,0	95	100,0	94	100,0

Sumber: analisis angket orang tua dan siswa

Tingkat ekonomi orang tua siswa memiliki pengaruh terhadap kemampuan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah putra-putrinya. Tabel 4.6 menunjukkan hubungan tingkat ekonomi orang tua siswa dengan kemampuan membiayai sekolah.

Tabel 4.6 Hubungan tingkat ekonomi orang tua siswa dengan kemampuan membiayai sekolah

No	Tingkat ekonomi	Pendapat orang tua					Pendapat siswa				
		Membiayai sekolah			Persentase		Membiayai sekolah			Persentase	
		Cukup	Belum	Σ	Cukup	Belum	Cukup	Belum	Σ	Cukup	Belum
1	Bawah	5	37	42	11,9	88,1	7	33	40	17,5	82,5
2	Menengah	20	22	42	47,6	52,4	26	25	51	51,0	49,0
3	Atas	7	4	11	63,6	36,4	2	1	3	66,7	33,3
	Jumlah	32	63	95			35	59	94		

Sumber: angket orang tua dan siswa

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi orang tua maka mereka merasa lebih mampu untuk membiayai sekolah putra-putrinya. Orang tua siswa yang mengatakan **cukup mampu** membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan mereka selalu bersyukur dengan setiap rejeki yang diberikan Allah

SWT dan berusaha mencukup-cukupkan antara penghasilan dengan pengeluaran dan rata-rata memiliki tanggungan 1 sampai 2 anak, serta merasa terbantu dengan adanya program BOS, sekolah gratis, dan beasiswa dari pemerintah. Sedangkan orang tua yang merasa **belum mampu** membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan merasa pendidikan di jaman sekarang ini mahal, keterbatasan ekonomi/penghasilan tidak tetap, dan mereka belum mendapatkan bantuan pendidikan, memiliki banyak tanggungan, biaya transportasi mahal, dan kesulitan ke jenjang lebih tinggi.

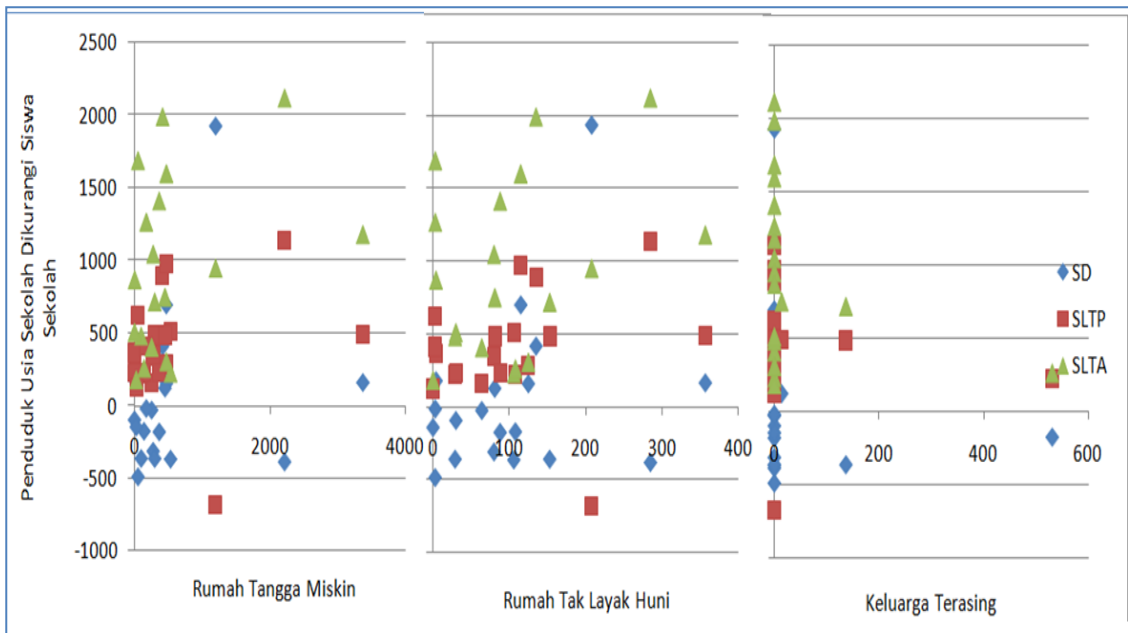
Rumah tangga miskin merupakan bahaya laten yang mengancam stabilitas keamanan, menghambat laju pembangunan dan menurunkan daya saing bangsa di tataran global. Salah satu usaha penting dan strategis dalam mengatasi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pendidikan dengan membuka kesempatan bersekolah bagi anak usia sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Dewan Riset Jakarta 2013-2014). Hubungan rumah tangga miskin dengan jumlah penduduk usia sekolah dan siswa sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hubungan rumah tangga miskin dengan jumlah penduduk usia sekolah dan siswa sekolah

No	kecamatan	Σ Penduduk	Rumah Tangga				SD			SLTP			SLTA		
			Σ	Miskin	Rumah Tak Layak Huni	Terasing	Usia Sekolah	Siswa Sekolah	Selisih	Usia Sekolah	Siswa Sekolah	Selisih	Usia Sekolah	Siswa Sekolah	Selisih
1	Aluh-aluh	28507	7471	275	80		3170	3481	-311	1553	1208	345	1576	531	1045
2	Beruntung Baru	13782	3630	252	64		1532	1559	-27	751	590	161	762	356	406
3	Gambut	38054	9911	533	106		4231	4597	-366	2073	1559	514	2103	1875	228
4	Kertak Hanyar	41447	10612	414	135		4609	4194	415	2258	1367	891	2291	304	1987
5	Tatah Makmur	11646	2937	470	125		1295	1138	157	634	350	284	644	337	307
6	Sei Tabuk	59540	15604	2219	285		6620	7005	-385	3244	2109	1135	3291	1176	2115
7	Martapura	107476	27248	1199	208		11951	10019	1932	5855	6532	-677	5940	4992	948
8	Martapura Timur	30449	7967	470	115		3386	2688	698	1659	685	974	1683	86	1597
9	Martapura Barat	17732	4626	2	4		1972	1795	177	966	601	365	980	111	869
10	Astambul	34618	8963	364	88		3849	4027	-178	1886	1655	231	1913	504	1409
11	Karang Intan	32530	8932	3377	357		3617	3454	163	1772	1281	491	1798	619	1179
12	Aranio	8727	2285	97	29		970	1331	-361	475	256	219	482	0	482
13	Sei Pinang	15638	4329	297	153	137	1739	2100	-361	852	367	485	864	148	716
14	Paramasan	4722	1241	140	108	532	525	698	-173	257	31	226	261	0	261
15	Pengaron	16788	4421	449	81	14	1867	1742	125	915	429	486	928	179	749
16	Sambung Makmur	12048	2891	0	30		1340	1435	-95	656	426	230	666	157	509
17	Mataraman	24739	6928	173	3		2751	2767	-16	1348	934	414	1367	103	1264
18	Simpang Empat	34596	9373	51	3		3847	4334	-487	1885	1262	623	1912	226	1686
19	Telaqa Bauntung	3289	921	24	0		366	509	-143	179	53	126	182	0	182

Sumber: Analisis data BPS tahun 2014

Hubungan antara rumah tangga miskin, rumah tangga dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing apabila digrafikkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Grafik hubungan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing terhadap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah

Gambar 4.3 menjelaskan bahwa besarnya rumah tangga miskin, rumah tangga dengan rumah tak layak huni, dan keluarga terasing sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah terutama pada jenjang SLTA maupun SLTP. Selisih penduduk usia SD dengan siswa SD yang sedang sekolah pada setiap kecamatan berbeda-beda, misalnya Martapura (+1932), Martapura Timur (+698), Kertak Hanyar (+415), Gambut (-366), Aranio (-361), Sei Pinang (-361), dll. Hal tersebut dikarenakan penghitungan siswa yang bersekolah dalam kecamatan tidak dihitung berdasarkan domisili siswa, sehingga ada beberapa sekolah yang domisili siswa berasal dari luar kecamatan atau ada siswa yang sekolah di luar kecamatan domisilinya. Sementara itu pada tingkat SLTP dan SLTA di setiap kecamatan pada umumnya masih ada beberapa siswa usia sekolah yang tidak bersekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin banyak siswa yang tidak bersekolah. Mereka setelah lulus SLTP pada umumnya memilih belajar di pondok pesantren.

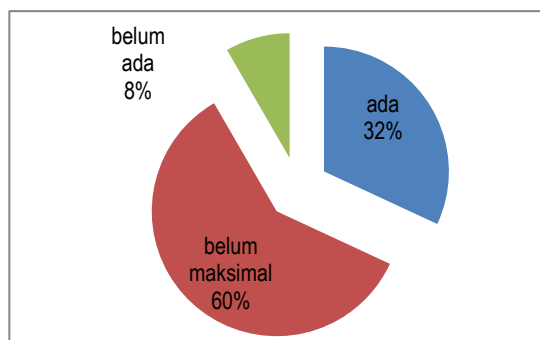
Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat (Menkoinfo, 2011). Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banjar memiliki peranan penting dalam menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (UU No 59 Tahun 2009). Pendapat orang tua siswa dan tokoh masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam membantu pendidikan untuk masyarakat miskin disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Kebijakan membantu pendidikan untuk masyarakat miskin

Pendapat	Orang tua	%	Tokoh masyarakat	%	Rata-rata (%)
1. Ada	29	30,5	4	33,3	31,9
2. Belum maksimal	58	61,1	7	58,3	59,7
3. Belum	8	8,4	1	8,3	8,35
Jumlah	95	100,0	12	100,0	100,0

Sumber: angket orang tua dan tokoh masyarakat

Apabila digrafikkan dapat dilihat pada Gambar 4.4



Gambar 4.4 Kebijakan membantu pendidikan masyarakat miskin

Pendapat orang tua dan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar sudah melakukan berbagai kebijakan (32%) dan kebijakan yang ada belum maksimal (60%) untuk membantu pendidikan siswa dari rumah tangga miskin.

Kebijakan belum maksimal maksudnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas tetapi belum dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan merata.

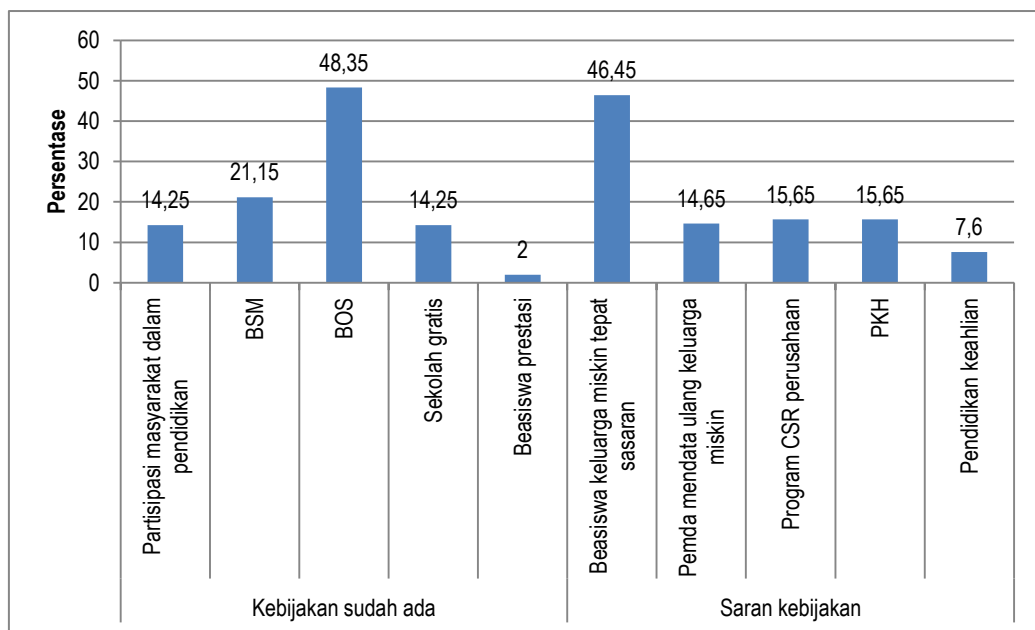
Pendapat orang tua dan masyarakat terkait kebijakan yang ada dan saran kebijakan pendidikan untuk membantu meningkatkan rata-rata lama sekolah pada masyarakat miskin disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan bagi masyarakat miskin

No	Pendapat	Orang Tua		Masyarakat		Rata-rata (%)
		Σ	%	Σ	%	
Kebijakan yang ada						
1	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan	12	16,0	1	12,5	14,25
2	BSM	13	17,3	2	25,0	21,15
3	BOS	35	46,7	4	50,0	48,35
4	Sekolah gratis	12	16,0	1	12,5	14,25
5	Beasiswa prestasi	3	4,0	0	0,0	2
	Jumlah	75	100,0	8	100,0	100
Saran kebijakan						
1	Beasiswa keluarga miskin tepat sasaran	32	48,5	4	44,4	46,45
2	Pemda mendata ulang keluarga miskin	12	18,2	1	11,1	14,65
3	Program CSR perusahaan	6	9,1	2	22,2	15,65
4	PKH	6	9,1	2	22,2	15,65
5	Pendidikan keahlian	10	15,2	0	0,0	7,6
	Jumlah	66	100,0	9	100,0	100,0

Sumber: angket orang tua dan tokoh masyarakat

Grafik kebijakan yang ada dan saran kebijakan pendidikan untuk membantu meningkatkan rata-rata lama sekolah pada masyarakat miskin dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Berbagai kebijakan pendidikan untuk masyarakat miskin

Berbagai kebijakan yang sudah dilakukan diantaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan, adanya bantuan biaya pendidikan melalui program BOS dan BSM, sekolah gratis, dan beasiswa prestasi. Saran kebijakan yang harus dilakukan adalah pemerintah harus memastikan pembagian beasiswa keluarga miskin tepat sasaran dan terdistribusi dengan baik (46,45%), pemerintah daerah mendata ulang rumah tangga miskin (14,65%) untuk mendapatkan data informasi rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan bantuan, menyukseskan program keluarga harapan (15,65%) yaitu program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu, pemerintah menjalin kerjasama dengan perusahaan daerah melalui CSR (15,65%) dalam mendukung upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah. Serta program pendidikan keahlian (7,6%) untuk membekali masyarakat miskin dengan keahlian khusus yang berguna dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin (UU No 59 Tahun 2009).

B. Tingkat Beban Ketergantungan Penduduk

Beban tanggungan keluarga merupakan penduduk usia tidak produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut) yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif. Tanggungan keluarga pada umumnya adalah putra-putrinya yang belum bekerja, orang tua yang sudah tua, anggota keluarga atau saudaranya sakit, atau orang lain yang menjadi tanggungan keluarga. Mengingat setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup, maka besarnya tanggungan keluarga akan mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga maupun kemampuan untuk membiayai pendidikan putra putrinya sampai pada jenjang yang diinginkan.

Pendapat orang tua dan siswa mengenai tanggungan keluarga mereka disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tanggungan keluarga

Tanggungan keluarga	Pendapat Orang tua		Pendapat Siswa		Rata-rata (%)
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	12	12,6	9	9,6	22,2
2	46	48,4	34	36,2	84,6
3	22	23,2	22	23,4	46,6
4	10	10,5	17	18,1	28,6
5	4	4,2	10	10,6	14,8
6	1	1,1	2	2,1	3,2
	95	100,0	94	100,0	100,0

Sumber: angket orang tua dan siswa

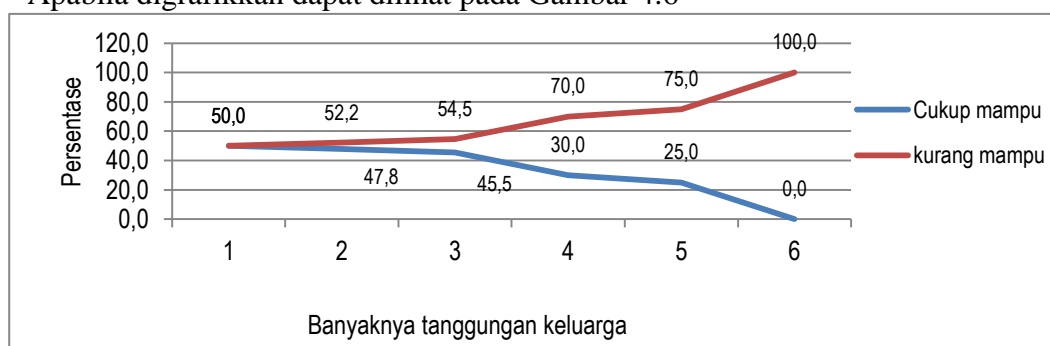
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tanggungan orang tua siswa paling banyak adalah dua orang (84,6%); tiga orang (46,6%); empat orang (28,6%), dan satu orang (22,2%). Sedangkan hubungan jumlah tanggungan suatu rumah tangga dengan kemampuan membiayai pendidikan disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Tanggungan keluarga dan kemampuan membiayai pendidikan

Tanggungan	Kemampuan membiayai pendidikan			
	Cukup mampu	%	Kurang mampu	%
1	6	50,0	6	50
2	22	47,8	24	52,2
3	10	45,5	12	54,5
4	3	30,0	7	70,0
5	1	25,0	3	75,0
6	0	0,0	1	100,0

Sumber: angket orang tua

Apabila digrafikkan dapat dilihat pada Gambar 4.6



Gambar 4.6 Hubungan tanggungan keluarga dan kemampuan membiayai pendidikan

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan keluarga ternyata kemampuan membiayai pendidikan semakin berkurang. Orang tua siswa yang mengatakan **cukup mampu** membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan mereka merasa terbantu dengan adanya program BOS dan sekolah gratis, serta ada orang tua yang merasa cukup menyekolahkan putra/putri hanya sampai jenjang SLTP. Orang tua yang merasa **belum mampu** membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan merasa biaya kebutuhan hidup di jaman sekarang ini mahal dan keterbatasan ekonomi/penghasilan tidak tetap.

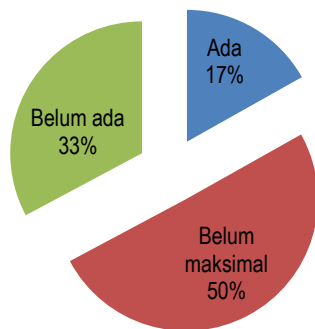
Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu pendidikan untuk keluarga dengan tanggungan disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Kebijakan membantu pendidikan untuk keluarga dengan tanggungan

Pendapat	Orang tua	%	Tokoh Masyarakat	%	Rata-rata (%)
1. Ada	16	17,0	2	16,7	16,9
2. Belum maksimal	32	34,0	8	66,7	50,4
3. Belum ada	46	48,9	2	16,7	32,8
Jumlah	94	100,0	12	100,0	100,0

Sumber: analisis angket orang tua dan tokoh masyarakat

Apabila digrafikkan dapat dilihat pada Gambar 4.7



Gambar 4.7 Kebijakan pendidikan untuk keluarga dengan tanggungan

Pendapat orang tua dan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar sudah melakukan berbagai kebijakan (17%) dan kebijakan yang ada belum maksimal (50%) untuk membantu pendidikan keluarga dengan tanggungan.

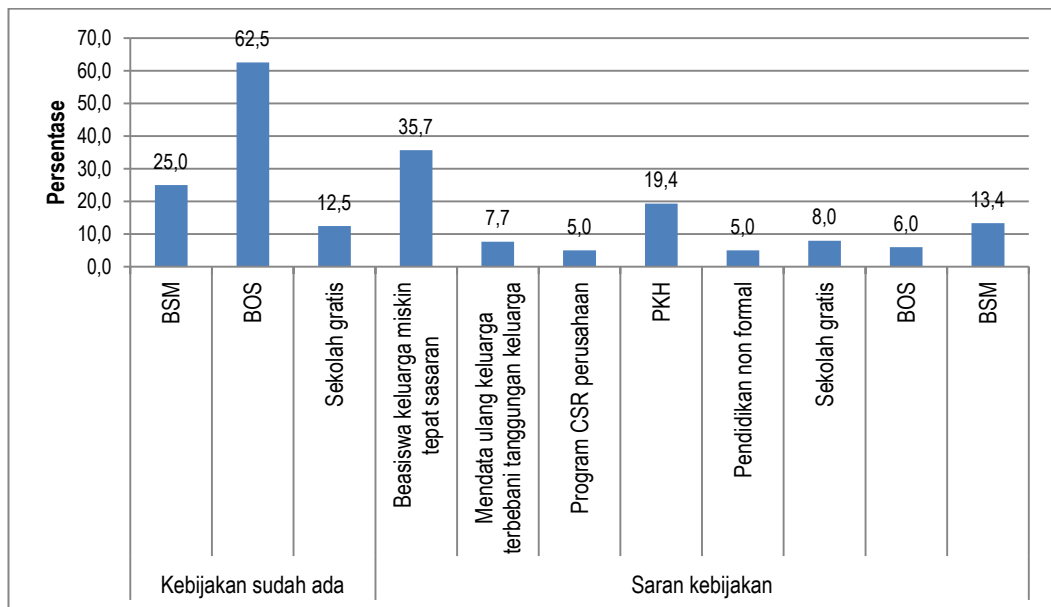
Pendapat orang tua dan masyarakat terkait kebijakan yang ada dan saran kebijakan pendidikan untuk membantu meningkatkan rata-rata lama sekolah pada rumah tangga dengan tanggungan disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan rumah tangga dengan tanggungan

Pendapat	Orang tua		Masyarakat		Rata-rata (%)
	Σ	%	Σ	%	
Kebijakan yang ada					
1. BSM	8	16,7	1	33,3	25,0
2. BOS	28	58,3	2	66,7	62,5
3. Sekolah gratis	12	25,0	0	0,0	12,5
Jumlah	48	100,0	3	100,0	100,0
Saran Kebijakan					
1. Beasiswa keluarga miskin tepat sasaran	16	21,3	5	50	35,7
2. Mendata ulang keluarga terbebani tanggungan keluarga	4	5,3	1	10	7,7
3. Program CSR perusahaan	0	0,0	1	10	5,0
4. PKH	14	18,7	2	20	19,4
5. Pendidikan non formal	0	0,0	1	10	5,0
6. Sekolah gratis	12	16,0	0	0	8,0
7. BOS	9	12,0	0	0	6,0
8. BSM	20	26,7	0	0	13,4
Jumlah	75	100,0	10	100	100,0

Sumber: analisis angket orang tua dan tokoh masyarakat

Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan rumah tangga dengan tanggungan dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 4.8 Kebijakan dan saran kebijakan pendidikan masyarakat dengan tanggungan

Berbagai kebijakan yang sudah dilakukan diantaranya menyalurkan bantuan biaya pendidikan melalui program BOS, BSM, sekolah gratis. BOS merupakan bantuan yang diberikan agar siswa dapat belajar baik di sekolah, BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, dan memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi, dan sekolah gratis merupakan tujuan adanya dana BOS, yaitu menggratiskan seluruh komponen biaya operasional di sekolah agar akses pendidikan semakin meluas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saran kebijakan yang harus dilakukan adalah pemerintah harus memastikan pembagian beasiswa keluarga miskin tepat sasaran dan terdistribusi dengan baik (35,7%), pemerintah daerah mendata ulang rumah tangga terbebani tanggungan (7,7%) yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan, menyukseskan program keluarga harapan (19,4%), memaksimalkan peranan CSR perusahaan (5,0) dalam mendukung upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah, penyediaan bantuan pembiayaan BOS/sekolah gratis dan BSM kepada siswa dari keluarga miskin dan tidak berdasarkan prestasi, dan pendidikan nonformal (5%) yang diharapkan dapat membantu menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan siswa seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya.

C. Tingkat jarak tempuh terhadap lama sekolah

Jarak tempuh sekolah merupakan batas fisik antara rumah dengan sekolah. Mudah tidaknya, cepat tidaknya waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekolah sangat ditentukan geografis wilayah, akses jalan yang harus dilewati, dan

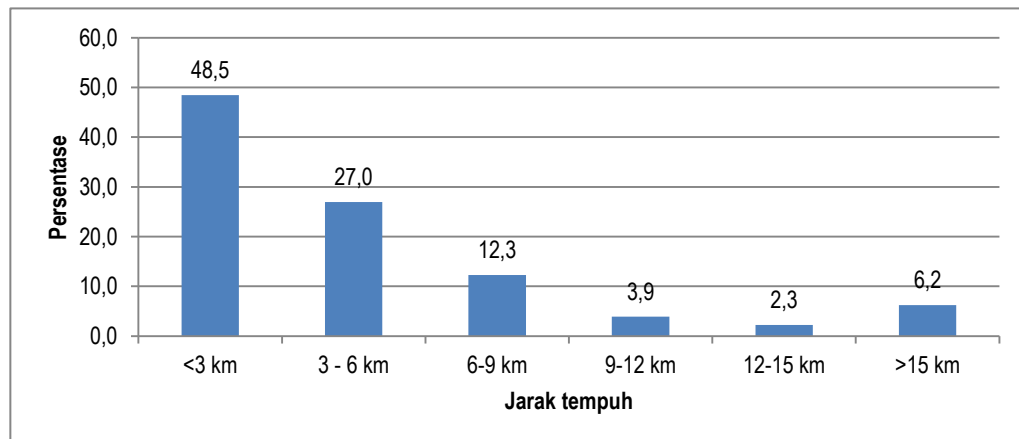
ketersediaan sarana transportasi terutama di wilayah pedesaan tidak semudah dan sebanyak di wilayah perkotaan dapat menghambat perjalanan dan memperbanyak waktu yang di butuhkan. Jumlah siswa dengan jarak tempuh tertentu akan disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Jumlah siswa dan jarak tempuh ke sekolah

No	Jarak	Pendapat orang tua		Pendapat siswa		Rata-rata (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	<3 km	40	44,0	46	52,9	48,5
2	3 - 6 km	26	28,6	22	25,3	27,0
3	6-9 km	14	15,4	8	9,2	12,3
4	9-12 km	4	4,4	3	3,4	3,9
5	12-15 km	2	2,2	2	2,3	2,3
6	>15 km	5	5,5	6	6,9	6,2
		91	100,0	87	100,0	100,0

Sumber: angket orang tua dan siswa

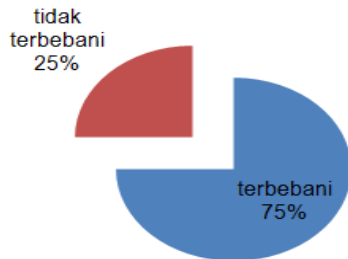
Apabila digrafikkan dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Grafik jumlah siswa terhadap jarak tempuh ke sekolah

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah paling dominan berada pada jarak tempuh kurang dari 3 km sebanyak 48,5%, jarak tempuh 3-6 km sebanyak 27%, jarak tempuh 6-9 km sebanyak 12,3%, dan jarak tempuh lebih dari 9 km sebanyak 12,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tempuh sebanding dengan jumlah siswa yang bersekolah. Semakin jauh jarak tempuh pada umumnya menjadi kendala untuk bersekolah, apabila di daerah yang terpencil dengan sarana prasarana jalan kurang nyaman, kesulitan sarana transportasi.

Jarak tempuh sekolah yang jauh memberikan perasaan tersendiri bagi orang tua siswa untuk mengijinkan putra-putrinya bersekolah. Pendapat orang tua siswa dalam menyikapi permasalahan jarak tempuh disajikan pada Gambar 4.10



Gambar 4.10 Perasaan terbebani orang tua dengan jarak tempuh sekolah

Orang tua siswa yang mengatakan “tidak terbebani jarak tempuh” sebanyak 25% untuk bersekolah dengan alasan mereka memberikan motivasi untuk semangat belajar dan menyadari bahwa belajar memerlukan perjuangan dan pengorbanan.

Sedangkan orang tua yang merasa terbebani dengan jarak tempuh untuk bersekolah sebanyak 75%. Mereka merasa tidak nyaman/was-was jika putra-putrinya menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, apalagi jika kesulitan sarana transportasi dan biaya transportasi mahal. Selain itu, jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah yang terlalu jauh membuat siswa sampai di sekolah dalam keadaan tidak segar dan sulit menerima pelajaran karena waktu lebih banyak di perjalanan membuat kecapekan dan tenaga terkuras.

Tabel 4.15 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SD yang tidak bersekolah

No	Kecamatan	Perkiraan Usia SD	Ketersediaan					Penduduk Usia Sekolah Dikurangi Siswa Sekolah	Rasio Murid/Guru
			Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid		
1	Aluh-aluh	3170	32	215	195	325	3481	-311	11
2	Beruntung Baru	1532	20	134	121	178	1559	-27	9
3	Gambut	4231	37	286	245	404	4597	-366	11
4	Kertak Hanyar	4609	24	281	191	290	4194	415	14
5	Tatah Makmur	1295	15	109	79	142	1138	157	8
6	Sei Tabuk	6620	45	400	319	520	7005	-385	13
7	Martapura	11951	49	537	466	718	10019	1932	14
8	Martapura Timur	3386	20	126	123	230	2688	698	12
9	Martapura Barat	1972	16	18	101	173	1795	177	10
10	Astambul	3849	36	264	226	202	4027	-178	20
11	Karang Intan	3617	34	237	215	376	3454	163	9
12	Aranio	970	14	101	89	129	1331	-361	10
13	Sei Pinang	1739	20	156	113	134	2100	-361	16
14	Paramasan	525	9	73	48	66	698	-173	11
15	Pengaron	1867	19	131	116	170	1742	125	10
16	Sambung Makmur	1340	14	104	85	113	1435	-95	13
17	Mataraman	2751	25	189	160	272	2767	-16	10
18	Simpang Empat	3847	39	346	233	355	4334	-487	12
19	Telaga Bauntung	366	5	47	30	42	509	-143	12
Jumlah		59636	473	3754	3155	4839	58873	763	

Sumber: Analisis data BPS tahun 2014

Tabel 4.16 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SLTP yang tidak sekolah

No	Kecamatan	Perkiraan Usia SLTP	Ketersediaan					Penduduk Usia Sekolah Dikurangi Siswa Sekolah	Rasio Murid/Guru
			Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid		
1	Aluh-aluh	1553	13	66	44	170	1208	345	7
2	Beruntung Baru	751	4	15	19	61	590	161	10
3	Gambut	2073	5	38	58	108	1559	514	14
4	Kertak Hanyar	2258	6	53	41	129	1367	891	11
5	Tatah Makmur	634	2	23	16	27	350	284	13
6	Sei Tabuk	3244	9	55	78	205	2109	1135	10
7	Martapura	5855	25	215	228	621	6532	-677	11
8	Martapura Timur	1659	3	24	23	71	685	974	10
9	Martapura Barat	966	6	24	25	90	601	365	7
10	Astambul	1886	11	64	66	161	1655	231	10
11	Karang Intan	1772	12	60	62	213	1281	491	6
12	Aranio	475	4	34	12	43	256	219	6
13	Sei Pinang	852	4	28	22	53	367	485	7
14	Paramasan	257	1	6	3	12	31	226	3
15	Pengaron	915	4	20	25	53	429	486	8
16	Sambung Makmur	656	7	24	18	62	426	230	7
17	Mataraman	1348	7	47	40	124	934	414	8
18	Simpang Empat	1885	9	90	51	160	1262	623	8
19	Telaga Bauntung	179	1	3	6	12	53	126	4
Jumlah		29217	133	889	837	2375	21695	7522	

Sumber: Analisis data BPS tahun 2014

Tabel 4.17 Hubungan rumah tangga miskin dengan penduduk usia SLTA yang tidak bersekolah

No	Kecamatan	Perkiraan Usia SLTA	Ketersediaan					Penduduk Usia Sekolah Dikurangi Siswa Sekolah	Rasio Murid/Guru
			Sekolah	Kelas	Ruang Kelas	Guru	Murid		
1	Aluh-aluh	1576	4	21	20	67	531	1045	8
2	Beruntung Baru	762	3	16	18	45	356	406	8
3	Gambut	2103	4	62	34	143	1875	228	13
4	Kertak Hanyar	2291	3	12	11	27	304	1987	11
5	Tatah Makmur	644	1	10	10	26	337	307	13
6	Sei Tabuk	3291	6	33	41	138	1176	2115	9
7	Martapura	5940	17	176	161	639	4992	948	8
8	Martapura Timur	1683	1	3	3	19	86	1597	5
9	Martapura Barat	980	1	4	4	18	111	869	6
10	Astambul	1913	3	18	19	48	504	1409	11
11	Karang Intan	1798	3	26	40	69	619	1179	9
12	Aranio	482	0	0	0	0	0	482	0
13	Sei Pinang	864	1	6	6	17	148	716	9
14	Paramasan	261	0	0	0	0	0	261	0
15	Pengaron	928	1	7	7	13	179	749	14
16	Sambung Makmur	666	2	7	13	43	157	509	4
17	Mataraman	1367	1	3	3	18	103	1264	6
18	Simpang Empat	1912	1	9	8	25	226	1686	9
19	Telaga Bauntung	182	0	0	0	0	0	182	0
Jumlah		29644	52	413	398	1355	11704	17940	

Sumber: Analisis data BPS tahun 2014

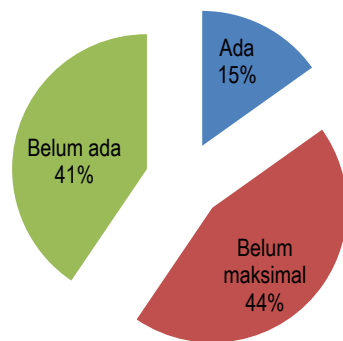
Pendapat orang tua dan tokoh masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi jarak tempuh siswa ke sekolah disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Kebijakan pendidikan membantu mengatasi jarak tempuh

Pendapat	Orang tua	%	Tokoh Masyarakat	%	Rata-rata (%)
1. Ada	12	13,6	2	16,7	15,2
2. Belum maksimal	56	63,6	3	25,0	44,3
3. Belum ada	20	22,7	7	58,3	40,5
Jumlah	88	100,0	12	100,0	100,0

Sumber: analisis data angket orang tua dan masyarakat

Apabila digrafikkan dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Kebijakan pendidikan untuk mengatasi jarak tempuh

Pendapat orang tua dan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar sudah melakukan berbagai kebijakan (15%) dan kebijakan yang ada belum maksimal (44%) untuk membantu pendidikan yang terkendala jarak tempuh.

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka mengatasi kendala jarak diantaranya membangun sekolah (41%) di wilayah yang jauh dari fasilitas sekolah untuk membantu mengatasi masalah jarak terlalu jauh, penyediaan sarana transportasi siswa (29%) dan perbaikan sarana dan prasarana jalan (22%) untuk memberikan kemudahan akses siswa dan kenyamanan orang tua saat putra putrinya berada dalam perjalanan menuju sekolah. BPS Kabupaten Banjar (2014) menjelaskan bahwa pada tahun 2013 jalan yang sudah di aspal sepanjang 659,78 km, 232,91 km berupa kerikil dan 67,70 km sisanya masih berupa tanah, serta 508,37 km dalam kondisi baik. Selain itu juga perlu adanya penyediaan biaya transportasi siswa yang disarankan sebagian masyarakat cukup mahal dan distribusi guru (10%) perlu dilakukan karena rasio jumlah guru dan siswa tidak sama.

Pendapat orang tua dan tokoh masyarakat terkait kebijakan ada dan sarana kebijakan dalam mengatasi jarak tempuh siswa ke sekolah sebagai berikut:

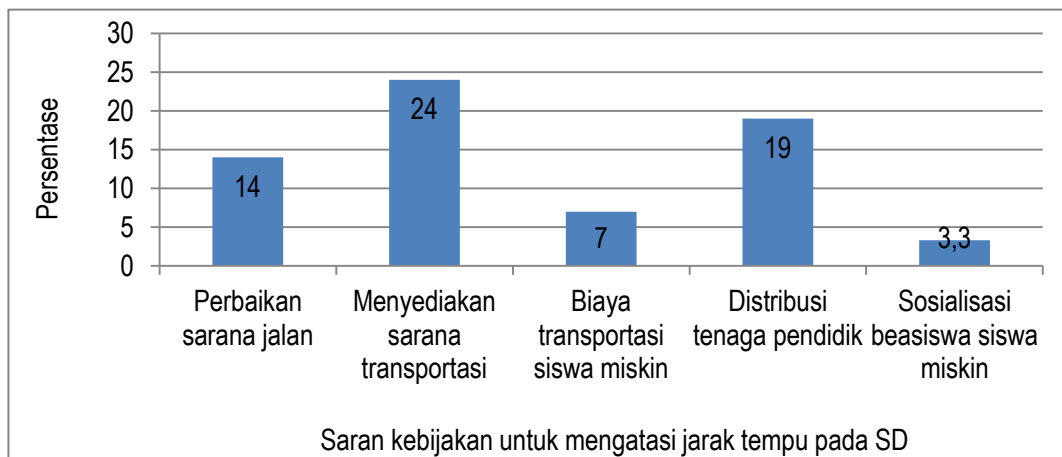
Tabel 4.19 Kebijakan dan saran kebijakan mengatasi jarak tempuh

Pendapat	Orang tua		Masyarakat		Rata-rata (%)
	Σ	%	Σ	%	
Kebijakan yang ada					
1. Membangun sekolah	12	16	2	67	41
2. Perbaikan sarana jalan	8	11	1	33	22
3. Penyediaan sarana transportasi siswa	18	24	1	33	29
4. Biaya transportasi siswa	22	29	0	0	15
5. Distribusi guru	15	20	0	0	10
Jumlah	75	100	3	100	100
Saran kebijakan untuk SD					
1. Perbaikan sarana jalan	6	8	2	20,0	14,0
2. Menyediakan sarana transportasi	6	8	4	40,0	24,0
3. Biaya transportasi siswa miskin	3	4	1	10,0	7,0
4. Distribusi tenaga pendidik	6	8	3	30,0	19,0
5. Sosialisasi beasiswa siswa miskin	5	7	0	0,0	3,3
Saran kebijakan untuk SLTP					
1. Perbaikan sarana jalan	4	5	2	20,0	12,7
2. Pembangunan sekolah	5	7	4	40,0	23,3
3. Menyediakan sarana transportasi	4	5	0	0,0	2,7
4. Biaya transportasi siswa miskin	2	3	1	10,0	6,3
5. Distribusi tenaga pendidik	4	5	2	20,0	12,7
6. Sosialisasi beasiswa siswa miskin	5	7	2	20,0	13,3
Saran kebijakan untuk SLTA					
1. Perbaikan sarana jalan	4	5	1	10,0	7,7
2. Pembangunan sekolah	6	8	4	40,0	24,0
3. Menyediakan sarana transportasi	2	3	1	10,0	6,3
4. Biaya transportasi siswa miskin	4	5	1	10,0	7,7
5. Distribusi tenaga pendidik	4	5	1	10,0	7,7
6. Sosialisasi beasiswa siswa miskin	5	7	2	20,0	13,3

Sumber: analisis data angket orang tua dan masyarakat

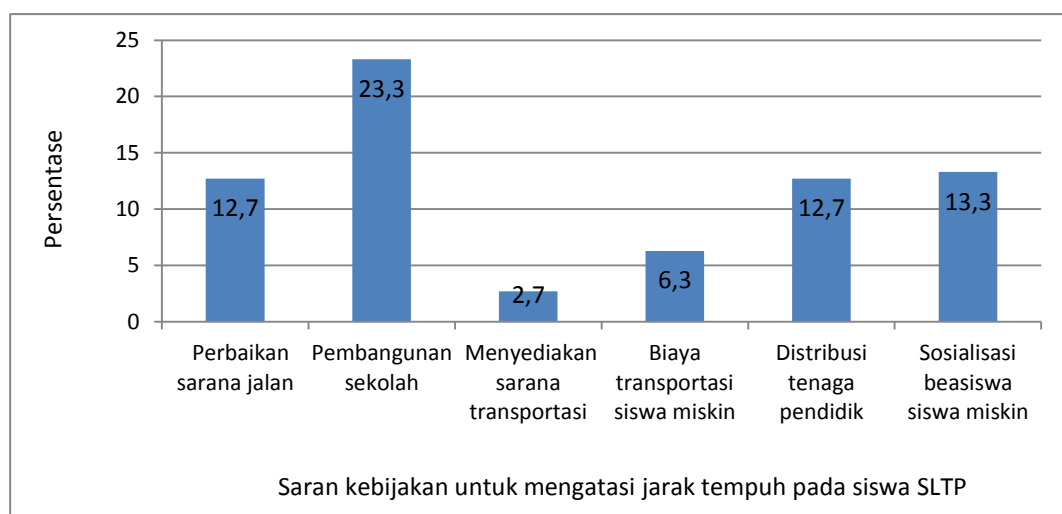
Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada sekolah dasar diprioritaskan pada penyediaan sarana transportasi yang mudah (24%) sehingga orang tua merasa tidak khawatir saat anaknya berangkat menuju sekolah, distribusi tenaga pendidik (19%) perlu dilakukan karena rasio jumlah guru dan murid persebarannya tidak merata pada setiap kecamatan, terutama wilayah yang kekurangan guru adalah Astambul (rasio 1: 20) dan sei Pinang (rasio 1: 16), sementara beberapa daerah lain kurang dari 10 misalnya Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan Karang Intan. Perbaikan jalan dan penyediaan transportasi bagi

siswa dari keluarga miskin perlu dilakukan untuk meringankan beban transportasi bagi rumah tangga miskin, dan melakukan sosialisasi beasiswa siswa bagi keluarga miskin (3,3%) sangat penting agar berbagai pihak terutama orang tua dan masyarakat sekitar mengetahui beasiswa bagi siswa miskin. Sosialisasi sangat penting untuk membantu siswa maupun orang tua memahami prosedur yang benar dalam mendapatkan beasiswa dan terhindar dari penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada sekolah dasar secara ringkas disajikan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada Sekolah Dasar

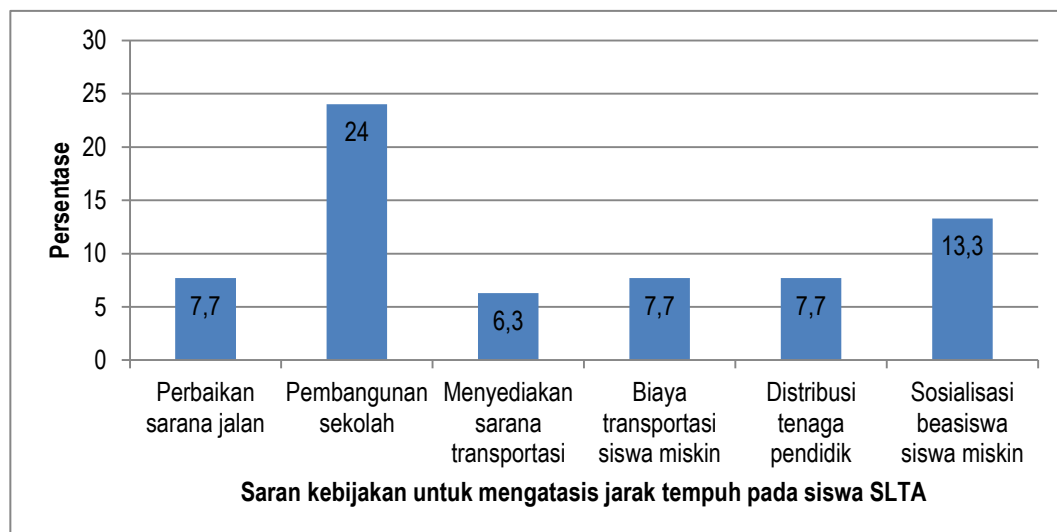
Grafik dan saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada siswa SLTP sebagai berikut:



Gambar 4.13 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTP

Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTP lebih diprioritaskan pada pembangunan sekolah (23,3%) dapat berupa sekolah baru atau sekolah satu atas terutama pada daerah-daerah jumlah penduduk usia sekolah tetapi tidak bersekolah karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah seperti Tatah Makmur, Martapura Timur, Kertak Hanya, dll. Sosialisasi beasiswa siswa bagi keluarga miskin (13,3%) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat agar memahami proses pengajuan beasiswa sebagai sarana pemerataan hak memperoleh layanan pendidikan bagi setiap masyarakat berusia sekolah. Meskipun rasio guru SLTP dengan siswa pada umumnya sudah sesuai permendikbud, namun distribusi tenaga pendidik (12,7%) sangat perlu dilakukan dalam rangka pemerataan guru yang profesional di setiap kecamatan. Perbaikan sarana jalan juga perlu diperhatikan agar siswa nyaman menuju sekolah, serta pentingnya alokasi biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin dan menyediakan sarana transportasi yang memudahkan siswa menuju sekolah.

Adapun grafik saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada siswa SLTA disajikan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTA

Saran kebijakan untuk mengatasi jarak tempuh pada SLTA hampir sama dengan SLTP yaitu lebih diprioritaskan pada pembangunan sekolah (24%) dapat berupa sekolah baru atau sekolah satu atas terutama pada daerah-daerah jumlah penduduk usia sekolah tetapi tidak bersekolah karena keterbatasan sarana dan prasarana

sekolah seperti Sei Tabuk, Martapura Timur, Simpang Empat, Mataraman, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, dan Aluh-aluh, dll. Sosialisasi beasiswa siswa bagi keluarga miskin (13,3%) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat agar memahami proses pengajuan beasiswa sebagai sarana pemerataan hak memperoleh layanan pendidikan bagi setiap masyarakat miskin yang berusia sekolah. Sosialisasi sangat penting untuk membantu siswa maupun orang tua memahami prosedur yang benar dalam mendapatkan beasiswa dan terhindar dari penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sosialisasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dalam menyiapkan putra-putrinya dalam menghadapi tantangan di masa depan, memecahkan berbagai masalah kehidupan, beradaptasi dengan tuntutan baru dan mengambil keuntungan dari peluang baru, serta penemuan keilmuan dan inovasi teknologi. Perbaikan sarana jalan dan biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin sangat menunjang minat siswa dan motivasi orang tua untuk melanjutkan ke SLTA, serta adanya distribusi guru akan menciptakan pemerataan layanan pendidikan dengan tenaga pendidik yang memenuhi kuantitas dan kualitas. Selain itu, juga perlu menyediakan sarana transportasi yang murah dan mudah dijangkau masyarakat dari keluarga terasing. Berbagai saran kebijakan pendidikan untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala jarak tempuh dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 12 tahun sebagai salah satu agenda utama pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Pelaksanaan Wajib 12 Tahun ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Bappenas, 2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI dan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi menetapkan salah satu kualifikasi jenjang S1 adalah mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

D. Strategi meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pembangunan pendidikan menengah pada kurun waktu 2015-2019 dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitasnya, serta membangun sistem yang lebih komprehensif melalui penyediaan alternatif pembelajaran yang beragam agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal (Bappenas, 2014). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar melalui pemerataan dan kemudahan akses layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari rumah tangga miskin untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang diinginkan.

Penyusunan strategi meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
- b. Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Program meningkatkan rata-rata lama sekolah yang telah diamanatkan Permendikbud no 13 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendiknas No 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Pendidikan Nonformal dan Informal,

- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan anggaran pendidikan sebesar 30%, melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 20% APBD (Humas Kabupaten Banjar, 2014).
- d. Visi Pemerintah Kabupaten Banjar “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera, mandiri, dan islami”. Berbagai program pendidikan yang ditetapkan diantaranya: (1) pemantapan program wajib belajar pendidikan dasar sampai dengan 12 tahun secara gratis, (2) pemantapan dan peningkatan program mutu pendidik dan tenaga kependidikan, (3) pemantapan penyediaan dana biaya operasional pendidikan daerah, (4) pemantapan program pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (5) pemantapan program pendidikan anak usia dini, dan (6) pemantapan program manajemen pelayanan pendidikan. Serta Rencana strategis bidang pendidikan dilaksanakan dalam bentuk: (1) pemantapan pendidikan dasar wajar 12 tahun, (2) pemantapan dan penyediaan dana BOPD lebih dari 6-8 M pertahun secara gratis, (3) pemantapan dan penyediaan alokasi dana pendidikan lebih besar dari yang dipersyaratkan UU sisdiknas, (4) pemantapan dan pengembangan sekolah bertaraf internasional, (5) pengembangan Lembaga Pendidikan Keterampilan Wirausaha bagi masyarakat, dan (6) pengembangan sekolah kejuruan (Bappeda Kabupaten Banjar, 2012: 44).
- e. Pemerintah propinsi maupun kabupaten Banjar sudah menetapkan perda tentang CSR Perusahaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan.
- f. Posisi strategis Kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai Kota Intan sekaligus Serambi Mekkah sebagai Kota Ulama dan Kota Santri karena menjadi salah satu rujukan menuntut agama Islam di Indonesia. Kota Martapura juga termasuk pengembangan kawasan metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura.

2. Kelemahan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS

- a. Rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar dari tahun 2010-2013 mengalami perkembangan fluktuatif, tahun 2010 sebesar 10,09% mengalami peningkatan menjadi 10,93% (tahun 2011) kemudian menurun menjadi 7,94% (tahun 2012). Tahun 2013 menurun menjadi 7,71 dari 140290 rumah tangga, rumah tangga dengan rumah tak layak huni masih 1,41%, dan keluarga terasing masih 0,49%.
- b. Perkembangan rumah tangga miskin pada setiap kecamatan di Kabupaten Banjar tahun 2010-2013 secara umum mengalami penurunan dan persebarannya tidak merata. Rata-rata rumah tangga miskin terbesar di Karang Intan sebesar 30,92%, Martapura sebesar 15,38%, Sei Tabuk sebesar 13,12%, Beruntung Baru dan Tatah Makmur sekitar 11%, sementara rumah tangga miskin paling sedikit berada di Martapura barat sebesar 0,04%, Sambung Makmur dan Simpang Empat sekitar 0,5%.
- c. Masyarakat pada tingkat ekonomi bawah sebesar 85,3% dan masyarakat ekonomi menengah sebesar 52,4% menyatakan kurang mampu untuk membiayai pendidikan. Mereka beralasan bahwa pendidikan di jaman sekarang ini mahal, keterbatasan ekonomi/penghasilan tidak tetap, dan mereka belum mendapatkan bantuan pendidikan, memiliki banyak tanggungan, biaya transportasi mahal, dan kesulitan ke jenjang lebih tinggi.
- d. Masyarakat di Kabupaten Banjar pada umumnya memiliki tanggungan 1 orang sebanyak 22,2%, 2 orang sebanyak 84,6%, tanggungan 3 orang sebanyak 46,6%, tanggungan 4 orang sebanyak 28,6%, dan lebih dari 5 orang sebanyak 18%. Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin merasa tidak mampu membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan biaya kebutuhan hidup di jaman sekarang ini mahal dan keterbatasan ekonomi/penghasilan tidak tetap.
- e. Jarak tempuh dari rumah siswa menuju sekolah pada umumnya juga berbeda-beda, jarak <3 km sekitar 48,5% siswa, jarak 3-6 km sebanyak 27,0% siswa, jarak 6-9 km sebanyak 12,3% siswa, jarak 9-12 km sebanyak 3,9% siswa, dan lebih dari 12 km 8,5%. Sebagian besar orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena jarak jauh dengan alasan keterbatasan

sarana transportasi dan biaya transportasi sekarang ini mahal, serta merasa tidak nyaman jika putra-putrinya menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah. Sedangkan orang tua yang merasa tidak terbebani karena menyadari bahwa belajar memerlukan perjuangan dan pengorbanan.

3. Tantangan Pelaksanaan Program Peningkatan RLS

- a. Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan arus informasi baik maupun buruk mudah diakses oleh berbagai kalangan usia kapanpun dan dimanapun mereka berada.
- b. Meningkatnya profesionalisme manajemen pengelolaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik (guru) swasta serta makin tingginya sikap kritis dan sadar “mutu” masyarakat dalam dunia pendidikan, sehingga muncul lembaga pendidikan swasta yang berkualitas dengan biaya lebih mahal.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan terutama wilayah sekitar Kabupaten Banjar yaitu Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin sebagai bagian dari dampak globalisasi dunia pendidikan (kebutuhan kompetisi abad 21)
- d. Ketidakpastian sistem politik, ekonomi dan sosial budaya yang berimplikasi pada sasaran kebijakan pendidikan yang bersifat fluakuatif khususnya kurikulum pendidikan nasional.

4. Peluang Pelaksanaan Program Peningkatan RLS

- a. Pemerintah melaksanakan pembangunan sekolah dapat berupa sekolah baru atau sekolah satu atap atau penambahan ruang kelas terutama pada daerah-daerah yang masih banyak jumlah penduduk usia sekolah SLTP dan SLTA yang tidak bersekolah seperti Sei Tabuk, Martapura Timur, Simpang Empat, Mataraman, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, dan Aluh-aluh, dll.
- b. Pemerintah daerah melakukan pemetaan penerimaan bantuan (22,4%) dengan memperhatikan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah.

- c. Pemerintah membentuk Komisi/UPT Pengawasan Penerapan berbagai beasiswa pada rumah tangga miskin (BOS, BSM, PKH, Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin, Bidik Misi) yang permanen dengan anggota dari Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Pendidikan dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Banjar.
- d. Pembuatan database penerima beasiswa siswa miskin dengan pemukhtahiran data setiap semester untuk menghindari pembayaran ganda dan pembayaran kepada pihak yang sudah tidak berhak.
- e. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala jarak tempuh.
- f. Memaksimalkan peranan perusahaan melalui program CSR dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah terutama pembiayaan operasional, personal, dan investasi untuk sarana perbaikan jalan, sarana transportasi, maupun penambahan gedung sekolah.
- g. Penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhannya melalui jalur formal.
- h. Pengadaan sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran dan peran utama orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah.
- i. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin.
- j. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Berdasarkan analisis pada terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), tantangan (*threat*) dan peluang (*opportunity*) Program PAUD selanjutnya dapat diringkas dalam tabel matriks SWOT yang berisi analisis faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) yang disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.20 Analisis SWOT

IFAS (INTERNAL FACTORS)	
<i>Kekuatan (Strength)</i>	<i>Kelemahan (Weakness)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ▪ Permen PP dan PA No 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak ▪ Permendikbud no 13 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. ▪ Permendiknas No 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Pendidikan Nonformal dan Informal. ▪ RPJM 2015-2019 peningkatan layanan hak layanan pendidikan mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah ▪ Visi dan Misi serta Rencana Strategis Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar ▪ Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan ▪ Pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan anggaran pendidikan sebesar 30%, melebihi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 20% APBD ▪ Pemerintah propinsi/Kabupaten Banjar sudah menetapkan perda tentang CSR Perusahaan ▪ Posisi strategis Kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar, Kota Intan, Serambi Mekkah, bagian proyek pengembangan kota metropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rumah tangga miskin cukup besar ▪ Perkembangan dan persebaran rumah tangga miskin pada setiap kecamatan tidak merata ▪ Sebagian besar orang merasa kurang mampu membiayai pendidikan putra putrinya ▪ Masyarakat memiliki tanggungan paling banyak antara 1 sampai 3 orang, semakin besar tanggungan maka semakin kesulitan membiayai pendidikan ▪ Jarak tempuh berbeda-beda dan paling banyak berada pada jarak 6 km ▪ Jarak tempuh yang jauh pada umumnya diikuti dengan sarana jalan, transportasi, dan biaya transportasi
EFAS (EXTERNAL FACTORS)	
<i>Peluang (Opportunity)</i>	<i>Tantangan (Threat)</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sekolah (sekolah baru/sekolah satu atap/penambahan ruang kelas) terutama SLTP dan SLTA di Sei Tabuk, Martapura Timur, Simpang Empat, Mataraman, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, dan Aluh-aluh. ▪ Pemetaan penerimaan bantuan dengan memperhatikan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah. ▪ Membentuk komisi/upt pengawasan penerapan berbagai beasiswa pada rumah tangga miskin (BOS, BSM, PKH, Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan arus informasi baik maupun buruk mudah diakses oleh berbagai kalangan usia kapanpun dan dimanapun mereka berada. ▪ Meningkatnya profesionalisme manajemen pengelolaan

Lanjutan Tabel 4.20

<i>EFAS (EXTERNAL FACTORS)</i>	
<i>Peluang (Opportunity)</i>	<i>Tantangan (Threat)</i>
<p>Bidik Misi) yang permanen dengan anggota dari Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Pendidikan dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Banjar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan database penerima beasiswa siswa miskin dengan pemukhtahiran data setiap semester ▪ Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala jarak tempuh. ▪ Menjalini kerjasama dari berbagai pihak terutama perusahaan melalui program CSR dalam pembiayaan operasional, personal, dan investasi untuk sarana perbaikan jalan, sarana transportasi, maupun penambahan gedung sekolah. ▪ Penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang kesulitan mengikuti jalur formal. ▪ Sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran dan peran utama orang tua dan masyarakat bahwa pendidikan formal tidak kalah pentingnya dengan pendidikan agama. ▪ Pemerataan tenaga pendidik dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin maupun keluarga terasing. 	<p>dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik (guru) swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari dampak globalisasi dunia pendidikan (kebutuhan kompetisi abad 21). ▪ Ketidakpastian sistem politik, ekonomi dan sosial budaya yang berimplikasi pada sasaran kebijakan pendidikan yang bersifat fluakuatif khususnya kurikulum pendidikan nasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar dari tahun 2010-2013 mengalami perkembangan fluktuatif, tahun 2010 sebesar 10,09% meningkat menjadi 10,93% (tahun 2011) kemudian menjadi 7,94% (tahun 2012). Rumah tangga miskin terbesar di Karang Intan sebesar 30,92%, Martapura sebesar 15,38%, Sei Tabuk sebesar 13,12%, Beruntung Baru dan Tatah Makmur sekitar 11%, sementara paling sedikit berada di Martapura barat sebesar 0,04%, Sambung Makmur dan Simpang Empat sekitar 0,5%. Masyarakat pada tingkat ekonomi bawah sebesar 85,3% dan masyarakat ekonomi menengah sebesar 52,4% menyatakan kurang mampu untuk membiayai pendidikan, karena biaya pendidikan mahal, keterbatasan ekonomi/penghasilan tidak tetap, dan mereka belum mendapatkan bantuan pendidikan, memiliki banyak tanggungan, dan biaya transportasi mahal.
2. Masyarakat di Kabupaten Banjar pada umumnya memiliki tanggungan 1 orang sebanyak 22,2%, 2 orang sebanyak 84,6%, tanggungan 3 orang sebanyak 46,6%, tanggungan 4 orang sebanyak 28,6%, dan lebih dari 5 orang sebanyak 18%. Semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin merasa tidak mampu membiayai pendidikan putra-putrinya dengan alasan biaya kebutuhan hidup di jaman sekarang ini mahal dan penghasilan tidak tetap.
3. Jarak tempuh dari rumah siswa menuju sekolah pada umumnya juga berbeda-beda, jarak <3 km sekitar 48,5% siswa, jarak 3-6 km sebanyak 27,0% siswa, jarak 6-9 km sebanyak 12,3% siswa, jarak 9-12 km sebanyak 3,9% siswa, dan lebih dari 12 km 8,5%. Sebagian besar orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena jarak jauh dengan alasan keterbatasan sarana transportasi dan biaya transportasi sekarang ini mahal, serta merasa tidak nyaman jika putra-putrinya menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah. Sedangkan orang tua yang merasa tidak terbebani karena menyadari bahwa belajar memerlukan perjuangan dan pengorbanan.

B. Strategi Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil temuan pengaruh rumah tangga miskin, beban ketergantungan, dan jarak tempuh terhadap kemampuan membiayai sekolah, selanjutnya dengan disusun arahan strategi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Strategi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar

Temuan	Strategi peningkatan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkembangan rumah tangga miskin fluktuatif dan tidak merata ▪ Beban ketergantungan mempengaruhi rata-rata lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan penerimaan bantuan dengan memperhatikan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah. ▪ Pembuatan database penerima beasiswa siswa dari keluarga miskin dengan pemukhtahiran data setiap semester untuk menghindari pembayaran ganda dan pembayaran kepada pihak yang sudah tidak berhak. ▪ Pemerintah membentuk Komisi/UPT Pengawasan Penerapan berbagai beasiswa pada rumah tangga miskin (BOS, BSM, PKH, Bantuan Belajar Mahasiswa Miskin, Bidik Misi) yang permanen dengan anggota dari Dinas Pendidikan, Dewan Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat bidang Pendidikan dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Banjar. ▪ Penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal. ▪ Pengadaan sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran dan peran utama orang tua dan masyarakat bahwa pendidikan formal tidak kalah penting dengan pendidikan agama. ▪ Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. ▪ Penyusunan Perda untuk mendukung Program Kartu Indonesia Pintar (KIPP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ▪ Pemerintah Daerah mengawal pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tepat sasaran.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak tempuh mempengaruhi rata-rata lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sekolah (sekolah baru/sekolah satu atap/penambahan ruang kelas) terutama SLTP dan SLTA. ▪ Pengadaan sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran dan peran utama orang tua dan masyarakat bahwa pendidikan harus diperjuangkan karena sangat penting bagi masa depan putra putrinya. ▪ Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa dari keluarga miskin yang mengalami kendala jarak tempuh. ▪ Meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak terutama perusahaan melalui perda program CSR dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah terutama pembiayaan operasional, personal, dan investasi untuk sarana perbaikan jalan, sarana transportasi, maupun penambahan gedung sekolah. ▪ Pendistribusian tenaga pendidik dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani pendidikan bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Banjar. (2011). *Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015*.
- Bappenas. (2014a). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2014b). *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2015). *Pra-Musrebangnas 2015: Kelompok Pembahasan Pendidikan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barrientos, Armando. 2010. *Social Protection and Poverty. Social Policy and Development Programme Paper Number No. 42. E-paper. United Nations Research Institute for Social Development*.
- BPS. (2012). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta.
- Budiriyanto, E. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU*. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI
- Ernawati, T. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat*. Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif*.
- Jayadinata, J.T., (1999). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. ITB Bandung.
- Kabupaten Banjar dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Banjar.
- Kabupaten Banjar dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Banjar.
- Kabupaten Banjar dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Banjar.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 Tentang *Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Program Indonesia Pintar*.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang *Pendidikan Menengah Universal*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang *Pemberian Bantuan kepada Pendidikan Nonformal dan Informal*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Romadona (2012). Pengertian Pendidikan Non Formal. Diakses melalui <http://pengertiandefinisii.blogspot.com/2012>.
- Rosyidi, S. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setkab. (2014). BOS Mendukung Pelaksanaan Sekolah Gratis. Diakses melalui <http://setkab.go.id/bos-mendukung-pelaksanaan-sekolah-gratis>.
- Sholeh, M. (2011). *Kemiskinan: Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya*. Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sukamdi, Pitoyo, A.J., Kiswanto, E. & Alfana, M.A.F. (2010). Executive Summary: Proyeksi penduduk dan kebutuhan pangan Indonesia. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Sulistyaningrum, Woro S. (2014). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)*. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
- Sirojuzilam. (2006). *Teori Lokasi*. Medan: USU Press.
- Supriadi, H. (ed). (2008). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: LIPI Press.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. & Smith, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- UNDP. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.